e-news letter
MEI I 2020
PKSPARLEMEN
KREAT[illegible]TIF, SUBSTANTIF
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DR. H. R. Ahmad Dimyati Natakusumah, S.H.,M.H.

PRESIDEN HARUS BUAT REGULASI HOLISTIK

Mengatasi Covid-19

Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

(No) Normal Policy

Pemerintah saat ini nampak enggan berubah, bertahan pada kebiasaan lama padahal sekeliling sudah banyak berubah. Sulit beradaptasi dalam menangkap kegelisahan public, economic oriented masih nampak dominan. Padahal banyak negara telah mengkonfirmasi situasi saat ini merupakan krisis kesehatan

Banyak analis memperkirakan pasca wabah covid 19 berlalu dunia akan menghadapi *New Normal*. Sebuah kehidupan yang benar-benar baru, berbeda jauh dibandingkan dengan sebelum adanya wabah Covid 19. Budaya hidup sehat menjadi sebuah keharusan, physical distancing jadi wajah interaksi mainstream, dan peningkatan pertemuan secara virtual menjadi kelaziman. Reformat atau reset.

Proses perubahan tersebut terjadi di berbagai sisi kehidupan baik secara personal utamanya sosial. Pada akhirnya secara alamiah membuat semua pihak harus beradaptasi dengan cepat dan tepat, tidak terkecuali di bidang politik dan pemerintahan, semua tanda menunjukkan akan adanya restrukturisasi peraturan. Beberapa akan menyambut ini, dengan alasan bahwa modernisasi sistem pengaturan perlu dilakukan. Sedangkan disisi lain masih ada yang akan melihat perubahan sebagai gangguan politik yang tidak diinginkan.

Pemerintah saat ini nampak enggan berubah, bertahan pada kebiasaan lama padahal sekeliling sudah banyak berubah. Sulit beradaptasi dalam menangkap kegelisahan *public, economic oriented* masih nampak dominan. Padahal banyak negara telah mengkonfirmasi situasi saat ini merupakan krisis kesehatan. Sungguh *slow down* yang terjadi bentuk konsekuensi yang harus ditempuh akibat merosotnya aktivitas pertukaran barang dan jasa secara global, bukan disebabkan *'trade war'* antara negara-negara kuat. Diagnosis awal, proses pengobatan dan perawatan akan sangat menentukan langkah Indonesia menghadapi Covid 19.

Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan maupun program, pusatnya ada di perppu 1 tahun 2020. Pendahuluan, batang tubuh dan akhirnya adalah tentang penyelamatan ekonomi. Di dalamnya lebih banyak bicara menyelamatkan orang yang mengambil keputusan, pelonggaran kebijakan yang jauh dari *good governance* dan *clean government* hingga diujungnya memungkin perilaku tidak terpuji dari para penumpang gelap terjadi dalam system keuangan kita. Selama tidak ada niat, maka semua bisa dipahami. Kita harus merenungkan perkataan anonim bang napi "Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan".

Ditingkat hilir kita menemukan sejumlah program pemerintah yang anomali. Tengok saja saat Bahan Bakar Minyak (BBM) di banyak negara turun karena anjloknya harga minyak dunia, di Indonesia sulit turun karena anjloknya kinerja korporasi. Saat sejumlah daerah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena menemukan peningkatan temuan positif covid 19, namun di saat bersamaan pemerintah pusat mewacanakan pelonggaran kebijakan tersebut. Ironisnya lagi, saat Mahkamah Agung

(MA) sudah memutuskan bahwa iuran BPJS Kesehatan harus turun, sudah hampir dua bulan Peraturan Presiden (Perpres) yang ditunggu tidak kunjung keluar. Masyarakat harus menghadapi kenyataan BBM tidak turun, PSBB diperlonggar, dan iuran BPJS Kesehatan yang enggan turun. Padahal sejumlah variabel telah mengalami perubahan sangat drastis, namun kebijakan yang dikeluarkan tidak responsif menangkap seluruh permasalahan tersebut.

Situasi berkebalikan terjadi pada program-progam populis, tetap 'ngotot' dan cepat tanggap. Bergegas membahas RUU omnibus law, ibukota baru, cetak sawah dan lainnya. Padahal urusan APD saja belum selesai, data suspect masih meningkat, dan lainnya. Kita harus segera menjaga jarak dengan apa yang dikeluhkan sebagian orang karena terganggu bisnisnya, untuk lebih serius mendasarkan setiap keputusan secara ilmiah yang akan menyelamatkan banyak orang.

Covid-19 Akibatkan Disintegrasi Bangsa

Dimyati: Presiden Segera Buat Aturan yang Holistik

Pemerintah tidak begitu memikirkan budget impact nya, karena semua mengeluarkan aturan, himbauan dan statemen yang berbeda-beda, sehingga penanganannya tidak terstruktur dan sistematis.

Dr. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, M.H
Anggota Komisi III DPR RI

Pandeglang (29/04) –- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah, kembali menekankan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan evaluasi serius terkait penanganan Covid-19 secara menyeluruh dan terpadu.

Menurut Dimyati, bila melihat penanganannya saat ini banyak aturan dan himbauan dari pusat dan daerah yang membingungkan masyarakat, termasuk pelaksana di level bawah.

"Kasihan yang ditagih dan dituntut masyarakat karena informasi yang didapat seolah-olah semua mendapatkan bantuan langsung tunai, bantuan pra kerja, bantuan sembako, bantuan pengobatan dll yang didapat dengan mudah, tapi kenyataannya tidak semudah yang diinformasikan," keluh Dimyati.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan begitu banyak pra syarat yang harus dimiliki untuk mendapatkan bantuan yang dijanjikan, karena semua menyampaikan dengan menggampangkan bantuan-bantuan tersebut," pungkas Dimyati.

Dimyati menambahkan Pemerintah tidak begitu memikirkan budget impact nya, karena semua mengeluarkan aturan, himbauan dan statemen yang berbeda-beda, sehingga penanganannya tidak terstruktur dan sistematis.

"Kondisi ini bisa mengakibatkan persoalan besar di lapangan, yakni akan munculnya saling menyalahkan dan saling curiga baik di tingkat masyarakat, pelaksana di level RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota," tutur pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang ini.

Anggota DPR RI dari Dapil Banten II ini menambahkan, karena banyaknya aturan dan instruksi dari Gubernur sampai dengan Menteri yang membuat aturan dan himbauan berbeda dan terus berubah, sehingga mengakibatkan tidak sinkron dan cepat tepat dalam penanganannya.

Kalau seperti ini terus terjadi, lanjut Dimyati, maka ujungnya akan ada problem baru terhadap keutuhan NKRI, maka harus diwaspadai karena covid19 mengakibatkan disintegrasi bangsa.

"Alhamdulillah banyak masukan dan kritikan kami diterima oleh pemerintah dan dijadikan kebijakan keputusan yang baik, walaupun agak terlambat. Tapi ini kami menyambut baik dari pada tidak sama sekali, masukan dan kritikan kami ini murni untuk bangsa dan negara tercinta ini, kami tdk punya tendensius dan penghargaan serta jabatan karena kami dari partai oposisi pemerintah saat ini, kami benar benar tulus ikhlas dan ridho demi Bangsa dan NKRI," pungkasnya.

"Kami berharap Presiden segera mengambil inisiasi membuat aturan perpres yang holistically dalam penanganan covid-19, dan aturan pelaksananya hanya lembaga/gugus tugas atau apa namanya yang ditetapkan dalam peraturan tersebut yang di dalam aturannya diamanahkan dibuat dan menindaklanjuti perpres yg telah dibuat, sehingga dilevel bawah tidak jadi kebingungan, dan pelaksanaanya dapat segera tuntas secara masif terstruktur dan sistematis," harap Dimyati melanjutkan.

Kepada Kementerian dan lembaga, Dimyati juga berharap, agar berkoordinasi kepada lembaga yang dibuat oleh peraturan tersebut, sehingga lebih fokus dan efisien efektif dalam perencanaan pembiayaan dan penanganan serta pengawasannya.

“Kami berharap Bapak Presiden segera mengambil langkah langkah strategis agar tidak terjadi disintegrasi bangsa akibat covid-19," tutup Dimyati.

#MAYDAY2020 | 1 MEI 2020

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PKS

DPR RI

Selamat

HARI BURUH INTERNASIONAL

Fraksi PKS terus berjuang
untuk mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan pekerja

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hari Buruh

Komitmen Fraksi PKS Jaga Hak-Hak Buruh di DPR

Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Dr. H. JAZULI JUWAINI, M.A
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengucapkan selamat Hari Buruh 1 Mei 2020 kepada para buruh di seluruh Indonesia. Jazuli mengatakan buruh adalah penggerak ekonomi bangsa, maka semua pihak semestinya menaruh hormat dan berpihak pada kesejahteraan buruh.

Jazuli Juwaini juga menyampaikan keprihatinan kepada para buruh karena Hari Buruh kali ini di tengah pandemi Covid-19 dan buruh diantara yang terkena dampak paling serius. Banyak buruh yang di-PHK dan dirumahkan. Oleh karena itu, Anggota DPR Dapil Banten ini meminta Pemerintah untuk menjamin kebutuhan mereka dengan program jaring pengaman sosial di masa pandemi yang telah diluncurkan serta memastikan pemerataannya.

"PKS dan Fraksi PKS seluruh Indonesia semaksimal mungkin turut membantu langsung kebutuhan rakyat melalui tebar paket kebutuhan pokok sejak awal pandemi ini terjadi. Kita terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling membantu," ungkapnya.

Fraksi PKS DPR sendiri berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh. Sehingga ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS adalah Fraksi pertama yang menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut.

"Kita punya tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial," kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengajak kepada semua pihak, baik pemerintah maupun kalangan dewan, untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.

"Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," pungkas Jazuli.

May Day di Tengah Covid-19

Jangan Biarkan Nasib Buruh Kian Memelas

Pemerintah harus punya solusi yang jelas untuk menyelamatkan kaum pekerja. Jangan biarkan gelombang PHK terus meningkat. Apalagi kalau wabah Covid-19 hanya dijadikan kambing hitam untuk melegalkan proses PHK

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (01/05) --- Hari Buruh 1 Mei 2020 diperingati dalam suasana prihatin akibat mewabahnya Covid-19 di lebih 200 negara. Tak ada aksi turun ke jalan, yang ada adalah PHK dan dirumahkannya kaum buruh. Hal ini membuat keprihatinan mendalam, bagi Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani.

"May Day ditengah pandemik Covid-19, jangan biarkan nasib kaum buruh kian memelas," kata Netty jelang acara diskusi daring tentang peran istri kepala daerah dalam penanganan Covid-19 yang diselenggarakan BPKD DPP PKS, Jum'at (01/05).

Diketahui gelombang PHK makin meningkat sebagai imbas menurunnya kegiatan sektor perekonomian. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat per 20 April 2020, sebanyak 2.084.593 orang telah kena PHK dan dirumahkan sementara.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Ade Afriandi, sampai dengan 25 April 2020 jumlah pekerja/buruh di Jawa Barat yang kehilangan pekerjaan akibat di-PHK dan dirumahkan sudah mencapai 62.848 orang.

"Pemerintah harus punya solusi yang jelas untuk menyelamatkan kaum pekerja. Jangan biarkan gelombang PHK terus meningkat. Apalagi kalau wabah Covid-19 hanya dijadikan kambing hitam untuk melegalkan proses PHK," katanya lebih lanjut.

Selama ini program stimulus ekonomi dari pemerintah, menurut Netty tidak punya dampak signifikan dalam menyetop laju gelombang PHK.

"Bukankah Presiden telah meminta jajarannya agar mempercepat stimulus ekonomi? Kenapa fakta di lapangan PHK dan perumahan sementara terus terjadi. Di Jawa Barat saja sekarang sudah hampir mencapai 70 ribu orang" terang Netty yang juga Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini.

Netty juga menyindir Program Kartu Prakerja yang diberikan pemerintah melalui pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat.

"Untuk apa melatih orang dengan dana yang begitu besar di tengah situasi Covid-19 ini? Tidak ada jaminan peserta Kartu Prakerja bisa langsung diterima bekerja setelah selesai pelatihan. Tentunya sulit buat perusahaan buka lowongan pekerjaan di situasi seperti ini," katanya.

Menurut Netty, program Kartu Pra Kerja hanya akan jadi balada nasib pekerja. "Lebih baik dana tersebut diberikan dalam bentuk bantuan langsung, jadi tepat peruntukannya. Dengan begitu masyarakat bisa bertahan hingga beberapa bulan kedepan menunggu industri kembali beroperasi," tandasnya.

Keprihatinan dalam May Day juga makin terasa saat Baleg DPR RI masih memaksakan untuk melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"RUU ini masih menjadi polemik, banyak menuai kritik, jika dipaksakan tentu berpotensi menimbulkan konflik," ujarnya.

Netty pun meminta pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyegerakan membayar klaim jaminan sosial saat buruh terPHK.

"Ada berapa jiwa di belakang jutaan pekerja yg di PHK dan dirumahkan. Uang jaminan sosial tersebut tentu amat dinantikan guna menyambung hidup,"katanya.

Terakhir, Netty mengajak kaum pekerja di seluruh Indonesia untuk memaknai momentum Hari Buruh ini dengan tetap semangat, tetap membangun kompetensi diri dan tetap yakin akan hadirnya kemudahan setelah situasi sulit ini.

Peringatan May Day,

Legislator PKS Tetap Tolak Bahas Omnibus Law Ciptaker

Kalau dipaksakan, bukan tidak mungkin PKS akan menolak RUU Ciptaker ini. Karena secara substansi RUU ini terlalu berpihak pada pengusaha dan merugikan rakyat kecil, terutama buruh

Dr. H. MULYANTO, M.Eng.
Anggota BALEG DPR RI

Tangerang Selatan (01/05) --- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menegaskan partainya konsisten keberatan untuk ikut membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), meskipun Pemerintah dan DPR RI sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan tapi tetap membahas klaster lain.

Aleg PKS dari Dapil Tangerang Raya ini menilai RUU setebal lebih dari 1.000 halaman ini dan akan mengubah tujuh puluh lebih UU adalah pekerjaan besar, serius dan penuh resiko. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah perundangan kita, satu RUU akan mengubah hampir seratus UU.

Sementara, lanjut Mulyanto, saat ini situasi kita, sesuai Keputusan Presiden No. 12/2020, adalah dalam kondisi Bencana Nasional. Semua tenaga dan pikiran difokuskan untuk menanggulangi darurat Covid 19.

"Kalau dipaksakan, bukan tidak mungkin PKS akan menolak RUU Ciptaker ini. Karena secara substansi RUU ini terlalu berpihak pada pengusaha dan merugikan rakyat kecil, terutama buruh," tegas anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Mulyanto melanjutkan, sedikitnya ada 4 masalah pokok yang mengganjal dalam RUU Ciptaker ini. Pertama, soal peraturan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja lokal dan menguntungkan pekerja asing.

Kedua, soal kewenangan daerah yang akan terpangkas. Ketiga, soal kelonggaran bagi pengusaha dan investor asing asing yang berlebihan sehingga mengancam kedaulatan ekonomi. Dan keempat, soal pemangkasan kewenangan lembaga legislatif.

Soal sistem ketenagakerjaan, Anggota Komisi VII DPR RI menilai, ada beberapa poin yang sangat merugikan pekerja lokal. Misalnya, hilangnya ketentuan upah minimum, berkurangnya nilai pesangon, penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) tanpa batas untuk semua jenis pekerjaan, pemberlakuan sistem kerja kontrak diperluas, serta terancam hilangnya jaminan sosial.

Sementara ketentuan bagi pekerja asing, kata Mulyanto, justru dipermudah seperti perusahaan diperbolehkan menggunakan tenaga kerja asing untuk pekerjaan yang tidak perlu keahlian khusus (unskill workers), dihapusnya syarat Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), "tidak diperlukan standar kompetensi TKA, dihapuskan kewajiban pengadaan tenaga pendamping bagi TKA dengan jabatan tertentu, dihapusnya larangan bagi TKA untuk menjadi pengurus di lembaga penyiaran swasta serta dihapusnya syarat rekomendasi dari organisasi pekerja profesional bagi TKA ahli di bidang pariwisata," imbuhnya.

Sementara terkait kewenangan pemerintah daerah, Mulyanto melihat ada beberapa ketentuan yang akan merugikan daerah seperti hilangnya hak daerah dalam penyusunan tata ruang daerah, ditariknya izin penyelenggaraan usaha minerba ke pemerintah pusat, dihilangkannya peran Pemda dalam penyelenggaraan tenaga listrik, dihilangkannya kesempatan BUMD menjadi pelaku penyedia tenaga listrik, ditariknya izin usaha pariwisata ke pemerintah pusat, dan banyak lagi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hari Buruh Internasional

Mardani: Pemerintah tidak Peka Buruh

Buruh menjadi viktimisasi kebijakan pemerintah yang mencela-mencle dan menguntungkan kelompoknya sendiri. Kita bisa lihat sendiri berubah-ubahnya kebijakan Covid 19 dan kasus staffsus Presiden yang dapat proyek kakap pemerintah? sedangkan buruh kita terkena gelombang PHK besar-besaran imbas dari kebijakan itu,

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (01/05) --- Inisiator gerakan #KamiOposisi, Mardani Ali Sera menganggap hari ini adalah hari buruk nasional karena tidak pekanya pemerintah kepada buruh. Ia menganggap pemerintah lebih peduli kepada pemilik modal.

"Saya mengucapkan selamat hari buruh kepada seluruh buruh di Indonesia. Hari ini menjadi hari buruk bagi buruh di Indonesia karena kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang nampaknya lebih pro kepada pemilik modal," kata Mardani, Jumat (01/05).

Lebih lanjut, Legislator PKS itu mengatakan kondisi buruh saat ini memperihatinkan karena sudah 2,8 juta buruh terkena PHK akibat Covid-19.

"Jumlah ini bisa terus bertambah apabila kebijakan pemerintah tidak tepat dan tanggap menanggulangi Pamdemik," ujar Mardani.

Wakil Ketua BPSAP DPR RI itu juga menganggap Buruh menjadi viktimisasi kebijakan pemerintah yang mencela-mencle dan menguntungkan kelompoknya sendiri.

"Kita bisa lihat sendiri berubah-ubahnya kebijakan Covid 19 dan kasus staffsus Presiden yang dapat proyek kakap pemerintah? sedangkan buruh kita terkena gelombang PHK besar-besaran impas dari kebijakan itu," tutur Mardani.

Anggota DPR Dapil Jakarta itu mendesak untuk segera menunda dan menyalurkan ke program stimulus Covid 19 yang sesuai dengan kondisi rill yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

"Saya minta Pemerintah mengedepankan empati dari pada kepentingan sendiri atau kelompok tertentu seperti menunda RUU Omnimbus Law cipker dan menyalurkan dana program kartu prakerja untuk stimulus ekonomi Covid 19 " kata Mardani.

Selanjutnya, Mardani juga minta pemerintah mendata buruh yang terkena PHK dan memasukkan menjadi orang yang berhak mendapatkan stimulus bantuan ekonomi dampak dari Pandemik.

"Data penerima harus diperbaiki, buruh yang terkena PHK juga harus menjadi prioritas penerima bantuan Pemerintah," ujarnya.

Terakhir Anggota Komisi II DPR RI itu berharap kedepannya kita melakukan refleksi seluruh kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat dan mengucapkan selamat hari buruh.

"Selamat Hari Buruh Interasional 2020, mari terus kedepankan nurani ketimbang kantong pribadi karena Buruh sejahtera, Negara Makmur," pungkasnya.

Refleksi Hari Buruh

Aleg PKS: Buruh Tani Kian Merana di Tengah Wabah Covid-19

Sebagai pekerja di sektor informal, mereka tak mengenal istilah upah minimum regional (UMR), yang hal ini berdampak upah buruh tani lebih rendah bila dibandingkan dengan upah pekerja kasar lainnya. Atas situasi ini, saya mendorong pemerintah agar segera memberikan “bantuan khusus untuk Buruh tani”

H. JOHAN ROSIHAN, S.T
Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (30/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan meminta kepada pemerintah untuk lebih spesifik memberi perhatian kepada nasib seluruh buruh tani di Indonesia pada masa wabah pandemic Covid-19 ini.

Seruan ini juga sehubungan dengan adanya momentum hari Buruh Internasional pada (01/05/2020) besok.

Menurut Johan, Pemerintah harus lebih peduli terhadap kondisi buruh tani kita, sebab selama ini mereka termarginalkan di negeri ini.

"Pendidikan mereka rata-rata masih rendah, tidak memiliki kemampuan berserikat seperti buruh pabrik lainnya dan tidak punya posisi tawar yang kuat untuk menuntut kenaikan upah", papar Johan.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini merasa sangat prihatin dengan keadaan nasib buruh tani pada masa pandemic Covid-19 sekarang ini.

"Hidup buruh tani sekarang kian pelik karena daya beli mereka terus merosot, hidup mereka makin susah karena selalu berkutat dengan kemiskinan apalagi pada saat wabah virus ini merebak, mereka banyak yang sulit bekerja karena harus karantina diri agar tidak tertular dan hal ini membuat buruh tani dan keluarganya banyak yang semakin menderita karena kekurangan akses pangan akibat kenaikan biaya hidup yang semakin melambung," ucap Johan.

Legislator dari Dapil NTB 1 ini menyebut bahwa saat ini upah nominal harian buruh tani nasional adalah sebesar Rp 55.173 per hari, sementara itu upah riil buruh tani mengalami penurunan sebesar 0,25 persen.

"Perlu dipahami bahwa upah riil buruh tani ini adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga perdesaan", papar Johan.

Selanjutnya, kata Johan, sebagai pekerja di sektor informal, mereka tak mengenal istilah upah minimum regional (UMR), yang hal ini berdampak upah buruh tani lebih rendah bila dibandingkan dengan upah pekerja kasar lainnya.

"Atas situasi ini, saya mendorong pemerintah agar segera memberikan “bantuan khusus untuk Buruh tani”. Melalui momentum Hari Buruh ini, ayo kita bantu para buruh tani kita," pinta Johan.

Pada Momentum 1 Mei 2020 ini, Johan mengajak kita semua untuk selalu ikut memperjuangkan tuntutan perbaikan kesejahteraan dan nasib buruh tani kita, karena buruh tani dan keluarganya merupakan penduduk miskin yang berjumlah lebih dari 5 juta orang, yang banyak tinggal di desa dan menggantungkan hidup pada sector Pertanian.

"Saat ini mayoritas dari jumlah total penduduk miskin itu berada di pedesaan dengan persentase mencapai 62,6 persen," urai Johan. Selengkapnya di fraksi.pks.id

Refleksi Hari Buruh Internasional 2020

3 KADO
DARI PEMERINTAH

1. Kartu Prakerja yang tidak menjawab tuntutan kebutuhan pekerja tapi malah menjadi **LADANG PROYEK**

2. RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang alih-alih menciptakan lapangan kerja, namun justru **MENGANCAM HAK-HAK** dan nasib pekerja yang saat ini bekerja

3. **TIDAK ADANYA ANTISIPASI** terhadap ancaman gelombang PHK akibat krisis ekonomi yang mengiringi wabah covid-19.

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Aneksasi Tepi Barat Oleh Israel

Ancaman Perdamaian Dunia & Penjajahan di Era Milenial

"Mengutip pernyataan Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour Ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemi, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina, ini jelas teror ditengah Pandemi, kita harus bersama hentikan ini

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (29/04) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari menyoroti langkah Pemerintah AS yang menyatakan siap mengakui langkah Israel, menganeksasi wilayah pendudukan di Tepi Barat.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini, apa yang dilakukan Pemerintah AS amat memalukan dan jelas sudah diprediksi sejak Pemerintahan Trump memindahkan kedutaannya ke Jerussalem yang semakin membuat ketegangan di Palestina di tengah Pandemi Covid-19.

"Ditengah Pandemi Covid-19 dan dunia tengah berusaha menyelamatkan nyawa setiap anak manusia, di belahan bumi Palestina tepatnya di Tepi Barat Israel dengan diamini AS mengambil langkah berbahaya dan jahat dengan menganeksasi (mengambil paksa) tanah area Palestina yang mengancam perdamaian dunia dan jelas sebuah penjajahan di era milenial yang memalukan dan menginjak-injak nilai kemanusian kita " Jelas Abdul KhariS.

Dengan kondisi tersebut, Abdul Kharis juga meminta Kementerian Luar Negeri segera mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membuat sidang darurat menyikapi langkah Israel dan AS tersebut. Kharis merasa aneksasi tidak sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB lainnya.

"Mengutip pernyataan Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour Ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemi, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina, ini jelas teror ditengah Pandemi, kita harus bersama hentikan ini" tegas legislator dari Fraksi PKS ini.

Kharis mendukung sikap Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan "Open Debate" DK PBB beberapa hari lalu secara virtual untuk membahas kondisi terkini di Palestina dan kawasan Timur Tengah, termasuk dalam hadapi pandemi Covid-19 dan meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus menggalang negara sahabat wabil khusus OKI dalam sikap yang sama.

"Aksi provokasi dan tindakan sepihak Israel dalam aneksasi wilayah Palestina jelas ditentang sebagian negara anggota DK PBB , itu jelas belum cukup kita harus galang sebanyak mungkin negara sahabat dan kita juga tegaskan kembali dukungan terhadap "two-state solution" yang berdasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati sesuai dengan berbagai resolusi DK PBB yang berujung pada Kemerdekaan Palestina tentunya" tutup Kharis menegaskan.

DPR Dorong TNI-Polri Berlaku Bijak Hadapi Masyarakat Terdampak Covid-19

Sebaiknya, TNI mensosialisakan nomor hotline dengan tokoh-tokoh di desa dan tokoh masyarakat bawah sebagai kesiapan reaksi cepat tanggap TNI-POLRI sehingga masyarakat merasa tenang dan terlindungi,"

H. SUKAMTA, Ph.D
Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (01/05) --- Dalam rapat antara Komisi 1 dengan Panglima TNI yang juga dihadiri oleh seluruh Kepala Staf beberapa pekan yang lalu, Sukamta, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS menyampaikan soal kesiapan TNI dalam membantu POLRI, ketika kondisi sosial dan ekonomi menjadi tidak stabil akibat pandemi Covid-19 ini.

"Tentu TNI sebagai alat negara akan selalu siap ditugaskan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diamanahkan oleh UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Kami mengapresiasi sikap TNI tersebut. Namun kami berharap agar rekan-rekan TNI bersama dengan Polri, berlaku bijak dalam menghadapi masyarakat kita yang sedang didera berbagai persoalan berat ini," kata Sukamta, Jumat (01/05) di Jakarta.

Satu sisi sebenarnya, Sukamta yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyayangkan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi dengan memilih opsi PSBB, yang ternyata pada prakteknya menjurus kepada penerapan karantina. Tetapi pemerintah di lapangan kurang sigap dan peka terhadap penderitaan masyarakat, seperti lambat dalam pemberian santunan kepada warga terdampak, harus menunggu tas dengan label "bantuan presiden".

Sementara sebagian masyarakat sudah kelaparan, tidak bisa ditunda-tunda lagi, mereka tidak lagi punya uang cukup untuk makan. Urusan perut bisa memicu munculnya kerawanan sosial.

Jadi, lanjut Sukamta, alih-alih menyelesaikan kebutuhan makan warga, malah justru menghadapinya dengan kekuatan keamanan. Bahkan sekarang ini, ditambah lagi dengan kebijakan mengizinkan kehadiran TKA dari China yang merupakan negara sumber Covid-19.

Dalam situasi masyarakat diimbau tidak keluar rumah sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan, kedatangan TKA tersebut dirasakan sebagai ketidakadilan yang dikhawatirkan bisa memprovokasi masyarakat.

Sukamta juga mendorong TNI dan POLRI untuk turut mendukung dan membersamai pendekatan religius bersama seluruh tokoh agama. Peran religiusitas ini penting dalam memperkokoh imunitas mental masyarakat. Apalagi kalau masyarakat diharuskan melakukan isolasi selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, yang membuat orang menjadi rawan stres.

TNI mungkin juga bisa berperan dalam menghadapi kemungkinan kelangkaan pangan karena saat ini banyak petani dan peternak yang berhenti karena tidak kuat memberikan pakan ternak dan harus isolasi.

Doktor lulusan Inggris ini juga mendorong TNI bersama Polri melalui Babinsa dan Babin kamtibmas ikut mensosialisasikan solusi-solusi murah kesehatan publik di kota-kota dan desa-desa dengan sumber tanaman dan hewan dari kekayaan alam Indonesia yang luas dan beragam.

"Terakhir, sebaiknya, TNI mensosialisakan nomor hotline dengan tokoh-tokoh di desa dan tokoh masyarakat bawah sebagai kesiapan reaksi cepat tanggap TNI-POLRI sehingga masyarakat merasa tenang dan terlindungi," tutup wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Demi Kemanan Negara

Anggota DPR Desak Kominfo Proteksi Rapat Virtual

Karena itu Kemkominfo agar segera memberi penjelasan tentang cara aman penggunaan aplikasi rapat virtual Zoom dan atau aplikasi lainnya. Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat

KH TORIQ HIDAYAT, Lc
Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (29/04) — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Toriq Hidayat mendukung dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/57/IV/2020 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) tentang Pelarangan penggunaan aplikasi Zoom bagi seluruh jajaran di lingkungan Kemhan.

"Sejak awal saya telah mendapatkan informasi bahwa aplikasi zoom ini memiliki beberapa kelemahan terutama pada sisi keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Karena jika benar aplikasi ini bisa disadap maka akan banyak informasi penting termasuk rahasia negara yang bisa saja dicuri oleh negara lain atau pihak-pihak lain yang tidak bertanggung-jawab. kemudian Informasi penting itu diperjual belikan. Menurut saya langkah yang diambil oleh Mentri Pertahanan sudah tepat sebagai bentuk kewaspadaan", ungkap Toriq.

Dalam Surat Edaran disebutkan alasan untuk tidak menggunakan aplikasi Zoom yang pertama tidak adanya jaminan keamanan data dari pihak penyedia aplikasi.

Kedua, karena adanya duplikasi traffic yang dilaporkan pihak penyedia aplikasi Zoom ke server yang berada di negara lain, mengakibatkan data pembicaraan dapat dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Dan Ketiga, berdasarkan hasil analisis dan riset dalam beberapa kasus penggunaan aplikasi Zoom telah dilaporkan kebocoran data dan telah diakui pihak vendor Zoom bahwa hal tersebut belum dapat diantisipasi secara tepat, Toriq menambahkan

"Dalam kondisi normal saja, sebagian besar kegiatan rapat dengar pendapat antara Kemhan dan DPR RI dilakukan secara tertutup yang artinya hal yang akan dibahas dengan anggota DPR adalah hal yang strategis dan tidak boleh diketahui publik secara umum. Saat pandemi COVID-19 dimana diberlakukan kebijakan physical distancing maka rapat secara virtual adalah sebuah solusi agar komunikasi antar Kementrian/lembaga (K/L) tetap terjaga. Jika demikian maka seluruh K/L, terutama Kemhan harus menyiapkan dukungan rapat virtual yang aman dan dapat diandalkan sebagai alternatif komunikasi bagi pimpinan Kemhan", harap Toriq.

Selanjutnya Toriq mempertanyakan upaya Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menjaga kerahasiaan rapat-rapat pemerintah dalam rapat virtual selama adanya wabah COVID-19.

"Kemkominfo bertanggung jawab mempersiapkan infrastruktur dan ketersediaan aplikasi rapat virtual yang digunakan oleh Kementrian/Lembaga selama adanya COVID-19. Bagus sekali jika bisa menghadirkan aplikasi rapat virtual produk anak bangsa, kalaupun harus menggunakan produk luar negeri karena keterbatasan waktu Kemkominfo harus memastikan aplikasi tersebut aman", pinta Toriq.

Banyak keluhan dari masyarakat, diantaranya dari komunitas dosen yang merasa khawatir dengan aplikasi rapat virtual yang mereka gunakan saat mengajar dan rapat-rapat penting. Karena itu Kemkominfo agar segera memberi penjelasan tentang cara aman penggunaan aplikasi rapat virtual Zoom dan atau aplikasi lainnya. Agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang sedang berjuang menghadapi berbagai masalah akibat pandemi COVID-19, Toriq menambahkan.

Mardani Kritisi Penyaluran BLT Melibatkan Transportasi Daring

"Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komperhensif terkait seluruh data negara ini, apalagi terkait data orang tidak mampu?"

Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (01/05) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritisi penyaluran bantuan tunai langsung melalui pelibatan big data transportasi daring dan ecommerce.

Menurut Mardani, upaya ini menunjukkan kelemahan data pemerintah dan ada potensi pemborosan harga.

"Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komperhensif terkait seluruh data negara ini, apalagi terkait data orang tidak mampu?" kata Mardani, Kamis (30/04).

Lebih lanjut ketua DPP PKS itu mengatakan, perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya TNP2K, BPS, Kemensos, Kementan, Bulog, Kemenkes, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya.

"Selama ini tidak dibenahi masalah pendataan dan hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada perubahan," sesal Mardani.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan masalah stimulus ekonomi itu padahal kuncinya di efektifitas penyaluran bantuan melalui akurasi data.

"Kelemahan pendataan dan akurasi itu jadi Pemerintah minta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e commerce, jadi apa kerja pemerintah selama ini?" tukasnya.

Selain itu, ia juga khawatir terkahit pengawasan pada pengiriman melalui transportasi daring juga di khawatirkan lemahnya pengawasan.

"Pengawasannya seperti apa ini? apa lagi mereka juga penerima bantuan yang sama dari pemerintah, usul saya asosiasi pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, perkerja informal, ojek pangkalan, supir taksi dan mikrolet dan kelompok lainnya juga dilibatkan melalui prangkat desa, RT dan RW," kata Mardani.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu minta pemerintah membuat kebijakan yang komperhensif dan detil agar stimulus sampai kepada orang yang tepat untuk membantu kehidupan ekonomi yang terdampak Covid 19,

"Saya minta Presiden membuat konsep yang menyeluruh dulu, mulai dari data akurat mana yang mau dipakai Pemerintah, Saya minta untuk tapi tetap mengabil data dari instrumen negara yang su-dah ada seperti BPS, Dukcapil Dirjen Pajak, Kemensos, Keme-nkes, Bulog di singkronkan menjadi satu kesatuan data untuk menyalurkan BLT," kata Mardani

Terakhir, Ketua DPP PKS itu mengatakan, "Selanjutnya potensi penyimpangan bila kerjasama dengan swasta tetap ada selain cost yang mahal perlu kita bayar, terakhir, The evil is in the detail, oleh itu penting juga pola pengawasan yang jelas, jangan sampai digunakan oleh oknum tertentu untuk kampaye pribadi misalnya," pungkasnya.

Kedatangan 500 TKA China

Habib Aboe: Pemerintah Harus Dengarkan Penolakan Warga!

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (03/05) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy, menyoroti informasi rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe, yang membawa kericuhan di publik.

"Kedatangan 500 TKA asal China banyak mengundang penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Di tengah wabah covid-19, lanjut Anggota Komisi III DPR RI ini, pemerintah membatasi pegerakan masyarakat dan meminta tetap tinggal di rumah, namun disisi lain para TKA China diperbolehkan masuk ke Indonesia.

"Apalagi pada situasi saat ini banyak PHK yang dialami masyarakat, pemerintah malah memberikan peluang TKA China mencari pekerjaan di Indonesia," tandas Bendahara Fraksi PKS ini.

Tentunya, lanjut Habib Aboe, ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan dari pada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri

"Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China. Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut berlaku sejak 2 April 2020, seharusnya masih efektif sampai sekarang. Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut," tutup pria berkacamata ini.

Pelatihan Daring Petani Hutan

Anggota Fraksi PKS: Jangan Sekedar Realisasi Program

Wabah covid 19 dan kebijakan social distancing, telah membuat mekanisme pertemuan serba online. Namun, karakteristik petani hutan ini berbeda dari sisi budaya, geografis, dan dukungan infrakstruktur sehingga memerlukan beberapa penyesuaian"

drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (27/04) --- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mengadakan pelatihan jarak jauh (e-learning) untuk peningkatan kapasitas sekitar 3000 petani hutan seluruh Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengingatkan pemerintah agar menghitung efektifitas pelatihan secara daring bagi masyarakat hutan. Hal ini juga telah disampaikan oleh Slamet pada rapat refocussing kegiatan antara KLHK dengan Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Efektifitas pelatihan daring harus terdapat evaluasinya, sehingga jangan sampai kegiatan seperti ini sekedar realisasi program kerja yang manfaatnya tidak dirasakan apa-apa oleh masyarakat." ujar Slamet.

Secara umum sumberdaya manusia petani kita, termasuk petani hutan, memiliki tingkat pendidikan serta kemampuan adopsi teknologi yang rendah. Dukungan infrastruktur teknologi juga masih menjadi kendala dibeberapa wilayah di Indonesia.

"Wabah covid 19 dan kebijakan social distancing, telah membuat mekanisme pertemuan serba online. Namun, karakteristik petani hutan ini berbeda dari sisi budaya, geografis, dan dukungan infrakstruktur sehingga memerlukan beberapa penyesuaian". Tegas Slamet yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi.

Terlebih materi yang akan disampaikan cukup banyak, yaitu berdurasi hingga 25 jam. Kegiatan yang terlaksana atas kerjsama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK dengan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, rencananya akan dilaksanakan mulai 27 April -18 Juni 2020.

"Bila tidak efektif dan tidak tepat sasaran, lebih baik program-program yang bersifat pelatihan formalitas dialihkan menjadi program jaring pengaman sosial sehingga lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dalam menhadapi wabah Covid 19 ini" tutup Slamet.

ANOMALI
PROGRAM CETAK SAWAH

1. Tidak mengingat sejarah, **1,6 T LENYAP DARI APBN** akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional

2. Anggaran Cetak Sawah sebesar 209,8 Milyar rupiah pada postur anggaran Tahun 2020, kemudian dipangkas menjadi 10,8 Milyar rupiah akibat penghematan, kini setelah **REFOCUSSING MENJADI NOL RUPIAH**

3. Percetakan sawah ini butuh waktu **MINIMAL 1 TAHUN.** Itupun diluar proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan. Masa wabah covid-19, cetak sawah belum proses tanam, keburu rakyat kelaparan akibat kekurangan pangan

“Saya meminta pemerintah jangan mengambil langkah yang hanya menghambur-kan uang negara. Penye-lamatan rakyat Indoensia akibat covid-19 ini memang perlu dilakukan terutama memenuhi kebutuhan pangan. Pikir ulang program cetak sawah di lahan gambut, yang ibarat menggarami lautan, kerja keras tapi tiada hasil

Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

Anggota FPKS: Program Cetak Sawah Salah Satu Kebijakan Anomali

Saya meminta pemerintah jangan mengambil langkah yang hanya menghamburkan uang negara. Penyelamatan rakyat Indonesia akibat covid-19 ini memang perlu dilakukan terutama memenuhi kebutuhan pangan. Pikir ulang program cetak sawah di llahan gambut, yang ibarat menggarami lautan, kerja keras tapi tiada hasil

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M
Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (01/05) --- Program Cetak Sawah Baru, yang kini digaungkan presiden RI, pada tahun 2020, dikatakan Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin sebagai kebijakan yang Anomali.

Politisi PKS ini mengatakan, untuk tahun-tahun sebelumnya, program cetak sawah baru merupakan sebuah harapan untuk menggenjot produksi pangan yang terutama beras yang selalu impor sejak tahun 1969 hingga sekarang. Pada jaman Suharto, hanya sekitar 10 tahunan Impor beras dapat ditekan dibawah 1 juta ton. Bahkan satu tahun sempat swasembada hingga ekspor 231 ribu ton sekitar tahun 1985 hingga 1986.

"Saat ini, kebijakan program cetak sawah ini benar-benar anomali. Pertama, tidak mengingat sejarah, 1,6 T lenyap dari APBN akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional. Kedua, Anggaran Cetak Sawah sebesar 209,8 Milyar rupiah pada postur anggaran Tahun 2020, kemudian dipangkas menjadi 10,8 Milyar rupiah akibat penghematan, kini setelah refocussing menjadi nol rupiah. Ketiga, percetakan sawah ini butuh waktu minimal 1 tahun. Itupun diluar proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan. Masa wabah covid-19, cetak sawah belum proses tanam, keburu rakyat kelaparan akibat kekurangan pangan", jelas Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini meminta kepada pemerintah, untuk dapat lebih bijak dalam menjalankan pemerintahan ini. Terlebih di masa wabah pandemi covid-19, akan memperlihatkan kecakapan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur sebuah negara yang sangat besar ini. Pada evaluasi BPK, pemerintah sudah mengakui bahwa masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga optimalisasi pemanfaatan sawah-sawah yang sudah dicetak periode 2014-2019 lebih baik dilakukan dari pada membuka lahan baru apalagi lahan gambut.

"Pemerintah jangan membuat statement yang seperti mimpi saja. Mau bangun program anggarannya di nol kan. Terlalu naif", ketusnya.

Akmal mengingatkan, bahwa upaya mempercepat pencapaian surplus beras nasional 10 juta ton tahun sejak tahun 2014 belum signifikan mengurangi kegiatan impor kita.

"Bahkan sejak beberapa waktu terakhir ini tentara pun dilibatkan, yakni melalui kegiatan Tentara Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP). Tapi tetap saja hingga kini belum terjadi perubahan terhadap stabilitas cadangan pangan nasional", pungkasnya.

Anggota Komisi IV ini mengutip pernyataan pemerintah untuk membuat perencanaan cetak sawah di Kalimantan Tengah sekitar 900.000 hektare, yang merupakan mayoritas tanah basah dan lahan gambut adalah ucapan ceplas-ceplos tanpa dasar.

Kepanikan akibat peringatan FAO tentang adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi Covid-19 memang harus disikapi.
Selengkapnya di fraksi.pks.id

Defisit Pangan di Sejumlah Provinsi

Jangan Jadikan Legalisasi Impor Pangan

jika memang benar mengalami defisit pangan, maka pemerintah harus segera memberikan stimulus dan memerintahkan Bulog membeli hasil panen petani yang saat ini sedang panen. Yang tidak kalah penting adalah kembalikan anggaran sektor pangan yang telah dikurangi pemerintah menjadi seperti semula agar produksi dan produktivitas pangan terjaga

H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (29/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa beberapa bahan pokok yang stocknya mengalami defisit di sejumlah provinsi, diantaranya gula pasir dan bawang putih defisit di 31 provinsi.

Atas hal tesebut menurut Johan, sebelumnya pemerintah selalu mengatakan stock bahan pangan selalu dalam kondisi aman dan cukup namun faktanya telah terjadi gejolak lonjakan harga pangan di pasar domestik.

"Harga gula pada pekan keempat April 2020 mencapai Rp 18.400/kg dan ini suatu rekor kenaikan harga yang fantastis, karena naik 36,8% dibanding April 2019", pungkasnya

"Atas situasi ini pemerintah sebelumnya berencana mempercepat realisasi impor, khususnya gula pasir dan bawang putih, jadi jangan buat alasan defisit pangan hanya untuk segera mempercepat impor", imbuh Johan.

Menurut Anggota FPKS ini, jika memang benar mengalami defisit pangan, maka pemerintah harus segera memberikan stimulus dan memerintahkan Bulog membeli hasil panen petani yang saat ini sedang panen.

"Yang tidak kalah penting adalah kembalikan anggaran sektor pangan yang telah dikurangi pemerintah menjadi seperti semula agar produksi dan produktivitas pangan terjaga," kata Johan.

Legislator dari Pulau Sumbawa ini juga mencontohkan bahwa Perubahan pagu anggaran di Ditjen Tanaman Pangan dari pagu awal Rp 5,7 T menjadi hanya Rp 3,3 T menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menjadikan peningkatan produksi tanaman pangan sebagai prioritas dalam menghadapi potensi krisis pangan global, sebagaimana yang telah diingatkan oleh FAO bahwa akan terjadi gangguan terhadap pasokan pangan global akibat pandemic Covid-19, serta telah terjadi 265 juta penduduk dunia yang sedang terancam kelaparan sebagai dampak dari pandemic Covid-19 menurut data dari World Food Programme/WFD.

Anggota DPR dari dapil NTB 1 ini menyebut bahwa saat ini akses masyarakat menengah ke bawah terhadap pangan semakin menurun drastis karena masyarakat tiba-tiba tidak dapat bekerja dan banyak yang kehilangan pekerjaanya. Di sisi lain ketersediaan pasokan pangan domestic mulai bermasalah karena ketergantungan dengan impor pangan.

"Saya mendorong pemerintah untuk secara serius mengantisipasi dampak social ekonomi karena tingkat sensitivitas pangan sangat tinggi, tutup Johan.

Hermanto Ingatkan Jokowi: Perppu, Perpres & SE Menkeu Mempercepat Krisis Pangan

Kementerian-kementerian ini perlu mendapatkan sokongan anggaran yang besar mengingat urgensinya sebagai tulang punggung pengadaan pangan nasional. Ketersediaan pangan merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekaligus menguatkan imunitas tubuh yang sangat dibutuhkan ditengah pandemi covid-19,

Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (29/04) --- Anggota Komisi IV dan Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Hermanto, menyoroti penerapan tiga aturan yang diterbitkan pada tahun 2020, yang diprediksi akan mempercepat krisis pangan karena telah memotong anggaran pangan yang sangat signifikan.

Menurut Hermanto, Ketiga aturan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan, Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

"Kedua, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020," sebut Hermanto.

Dan Ketiga, lanjut Hermanto, Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Ketiga aturan tersebut dalam prakteknya mengambil alih kewenangan hak budget DPR. Praktek ini menimbulkan implikasi yang mendalam terhadap penyusunan APBN," pungkasnya.

Hermanto menambahkan, pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan menteri dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para eselon satu diberbagai kementerian, DPR disuguhkan Anggaran yang sudah given dari Pemerintah.

"Tidak ada sedikitpun ruang kewenangan bagi DPR untuk melakukan perubahan demi merancang anggaran yang kredibel untuk kemakmuran rakyat", tandas Hermanto yang merupakan Anggota Badan Anggaran DPR ini.

Proses yang terjadi saat ini, kata Hermanto, kementerian-kementerian yang menjadi mitra komisi yang mengurusi pangan (Komisi IV DPR) melakukan pemotongan anggaran dua kali secara berturut-turut.

"Akibatnya, anggaran kementerian-kementerian tersebut berkurang dengan kisaran 15-30 persen", terangnya.

Sejatinya, ungkap Hermanto, anggaran kementerian-kementerian yang terkait dengan pengadaan pangan tidak dipotong. Mestinya sebaliknya, harus ditambah.

"Kementerian-kementerian ini perlu mendapatkan sokongan anggaran yang besar mengingat urgensinya sebagai tulang punggung pengadaan pangan nasional. Ketersediaan pangan merupakan jaminan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekaligus menguatkan imunitas tubuh yang sangat dibutuhkan ditengah pandemi covid-19," pungkasnya.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Defisit Pangan Beberapa Provinsi

Hamid: Suplai dari Daerah Surplus, Jangan Impor!

Bukti realisasi janji pemerintah adalah tidak Impor pangan. Karena dengan penjelasan kesiapan, kecukupan stok dan rencana-rencana strategis itu, bila masih saja impor, itu berati membohongi rakyat

Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.
Anggota Komisi IV DPR RI

Wonogiri (02/05) --- Anggota DPR RI Asal Dapil Jawa Tengah IV dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin meminta jangan melakukan Impor Pangan pasca pengumuman defisit pangan di beberapa provinsi.

Karena defisit pangan di suatu Provinsi di Indonesia, bila jalur distribusi logistik lancar, akan dapat ditambal dari daerah surplus.

Presiden mengumumkan defisit pangan termasuk defisit beras di tujuh provinsi di Indonesia, menurut Hamid untuk saat ini bukan sesuatu yang darurat untuk disikapi dengan melakukan Impor. Tapi hal yang sangat penting adalah penyikapan distribusi yang baik pada transportasi logistik antar provinsi menjadi sangat urgent terutama pada masa pandemi covid-19 seperti ini.

Politisi PKS ini mencontohkan, seperti ayam hidup di tingkat peternak, harganya terlalu murah dibandingkan biaya produksi (pakan) ataupun bila dibandingkan dengan harga jual di pasar. Begitu juga harga cabai.

Hamid menambahkan, untuk komoditas gula dan bawang putih, memang persoalannya harga tinggi yang menyusahkan konsumen. Bahkan pemerintah akan mengusulkan revisi HET (Harga eceran terendah gula).

"Dilema produk pangan, bila terlalu rendah mendzalimi petani atau peternak. Bila terlalu tinggi menyusahkan rakyat banyak. Jadi harus wajar", ucap Hamid yang duduk di Komisi IV DPR ini.

Legislator dari daerah Wonogri Jawa Tengah ini menjelaskan, dari berbagai diskusi ilmiah baik lembaga kajian maupun di Kampus, stok pangan kita saat ini masih sangat aman hingga tiga bulan kedepan.

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan produksi beras Indonesia pada Juni 2020 surplus 6,4 juta ton. Perkiraan ketersediaan beras tersebut didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada.

Stok pada akhir Maret 2020 terhitung sebanyak 3,45 juta ton. Rinciannya stok dari Bulog 1,4 juta ton, penggilingan 1,2 juta ton, pedagang 754.000 ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2,939 ton.

Hamid meminta kepada kementerian pertanian, agar janjinya sebagai sektor yang bertanggungjawab terhadap penyediaan pangan, mesti sesuai kenyataan akan persiapan berbagai strategi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19.

"Bukti realisasi janji pemerintah adalah tidak Impor pangan. Karena dengan penjelasan kesiapan, kecukupan stok dan rencana-rencana strategis itu, bila masih saja impor, itu berati membohongi rakyat. Saya berharap defisit di beberapa propinsi akan produk pangan tertentu, dapat di tambal dari propinsi lain yang surplus. Karena inilah fungsi negara hadir untuk rakyat", tutup Hamid Noor Yasin.

Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

Syahrul Aidi: Presiden Stop Pencitraan Bantuan

Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A
Anggota Komisi V DPR RI

Pekanbaru (29/04) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut bahwa presiden bersama jajarannya dipemerintahan terbukti tidak siap dalam menghadapi wabah Covid-19.

Menurut Syahrul, banyak kebijakan pemerintah yang tidak difikirkan secara matang sehingga tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lainnya sampai tingkat pemerintah daerah sehingga memperparah keadaan. Terkesan Presiden hanya pencitraan bantuan dan plin plan sehingga meremehkan keselamatan Rakyat.

"Pemerintahan Jokowi Periode 2 ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan. Hal ini terlihat sekali saat wabah Covid-19 ini melanda negara ini. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stake holder. Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja. Jadi implementasinya Nol sehingga hanya menjadi Pencitraan Bantuan Oleh Presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat" terangnya diujung telepon.

Setidaknya ada 4 stakeholder yang berkaitan erat dengan penaaganan Corona ini yaitu Kementrian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial.

Dia menerangkan efek dari ketidaksinkronan itu, konflik sosial muncul di lapisan bawah saat ini. Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

"Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan" tambahnya.

Dia meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19. Harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah.

"Sederhanakan alur birokrasinya dan cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid misalkan hari inj ada pool test algoritma yang dikembangkan oleh anak-anak muda kita. Kemudian Sesuaikan standar dengan keadaan kekinian. Misalkan saat ini ada BLT dari kemendes PDTT, maka seharusnya kementerian terima data up to date dari RT/RW jangan pakai data sendiri dari atas dan jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang di pakai dalam keadaan normal. Hari ini semua orang terdampak Covid 19 sehingga banyak orang-orang turun kelas, misalkan kelas pekerja terdampak PHK yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil semua harus dapat" tegasnya

Kemudian beliau juga menyoroti beleid yang selalu berbenturan dengan prinsip otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah terkungkung dengan instruksi tidak jelas dari pemerintah pusat.Padahal dengan di beri kewenangan dan kebebasan bertindak maka pemda bisa segera mengatasi Covid 19

BATALKAN!

PROGRAM PELATIHAN PENDOMPLENG KARTU PRA KERJA

Ada dua hal yang menjadi sorotan

1. Program pelatihan yang dijanjikan tak lebih hanya bisnis video tutorial yang harus dibayar negara melalui pemegang kartu pra kerja.

2. Jauh lebih baik jika dana sebesar Rp5,6 triliun itu diberikan kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hingga saat ini terus berjatuhan, karena dengan dana sebesar itu akan ada 2 juta orang korban PHK baru yang bisa dibantu.

Amin. Ak
Anggota Komisi VI DPR RI

"Mumpung belum terlambat, segera batalkan program pelatihan yang mendompleng program kartu pra kerja. Alihkan dana tersebut untuk membantu rakyat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah Covid-19 ini yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini

Amin Ak Minta Program Pelatihan Pendompleng Kartu Pra Kerja Dibatalkan

Mumpung belum terlambat, segera batalkan program pelatihan yang mendompleng program kartu pra kerja. Alihkan dana tersebut untuk membantu rakyat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah Covid-19 ini yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini

AMIN AK,M.M.
Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (01/05) --- Anggota Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan program pelatihan berbayar bagi penerima kartu pra kerja dan mengalihkannya untuk penguatan program jaring pengaman sosial. Hal itu disampaikan Amin dalam siaran persnya, Jumat (01/05).

Ada dua hal yang menjadi sorotan Amin terkait hal ini. Pertama, program pelatihan yang dijanjikan tak lebih hanya bisnis video tutorial yang harus dibayar negara melalui pemegang kartu pra kerja.

"Selain efektivitasnya dipertanyakan, video semacam itu bisa didapatkan oleh siapapun di media sosial secara gratis, sehingga proyek video seharga Rp 5,6 triliun itu hanya menghambur-hamburkan uang negara di masa sulit seperti saat ini," ungkapnya.

Dalam hitungan Amin, biaya untuk membuat 2.000 konten video semacam itu tak lebih dari Rp150 miliar, sehingga angka Rp5,6 tirliun sangat fantastis.

Program ini juga mendompleng program kartu pra kerja dan hanya menjadikan penerima kartu pra kerja obyek semata, karena sesungguhnya uang itu hanya dinikmati oleh pengelola program pelatihan.

"Mengapa tidak diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja sesuai tupoksinya sehingga negara tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk pengadaan video semacam itu," ujar Amin.

Kedua, lanjut Amin, jauh lebih baik jika dana sebesar Rp5,6 triliun itu diberikan kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang hingga saat ini terus berjatuhan, karena dengan dana sebesar itu akan ada 2 juta orang korban PHK baru yang bisa dibantu.

"Di wilayah Jabodetabek saja, seperti ramai diberitakan di berbagai media, sudah banyak korban PHK yang terpaksa menggelandang atau menjadi tuna wisma baru karena tidak sanggup membayar sewa kontrakan", paparnya.

Belum lama ini, keprihatinan juga muncul dari ratusan kepala desa di Kabupaten Bogor, Bekasi, Sukabumi, dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Barat dan Banten yang kini harus menghadapi protes warganya karena sedikitnya jumlah alokasi bantuan sosial dari pemerintah dibandingkan dengan jumlah warga terdampak wabah Covid-19 yang berhak mendapatkan bantuan. Sehingga hal itu berpotensi memicu konflik sosial di kalangan rakyat bawah.

"Mumpung belum terlambat, segera batalkan program pelatihan yang mendompleng program kartu pra kerja. Alihkan dana tersebut untuk membantu rakyat yang terdampak secara ekonomi oleh wabah Covid-19 ini yang jumlahnya terus bertambah hingga saat ini," tegas Amin.

Dampak Covid-19

Perbankan Segera Realisasikan Program Relaksasi kredit

Dunia usaha perlu kepastian agar segera menyusun rencana dan strategi baru dalam upaya penyelematan bisnis yang berdampak pada ekonomi rakyat

RAFLI
Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (01/05) --- Anggota DPR RI Rafli menegaskan perbankan harus segera melakukan realisasikan program relaksasi kredit, di tengah kondisi wabah covid-19 yang mempengaruhi dunia usaha dan berdampak pada perekonomian masyarakat.

"Persoalan krusial penyelematan dunia usaha akibat wabah covid-19, harus segera di realisasikan melalui program relaksasi kredit yang digulirkan, baik bagi UMKM, koperasi, maupun usaha yang bergerak lebih besar", ungkap Rafli melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Pimpinan Bank BUMN, yang berlangsung virtual, Kamis (30/04/2020) yang membahas implementasi Perppu No 1 Tahun 2020.

"Kita dan masyarakat dunia sedang berada diambang krisis ekonomi, kami terus kawal langkah presiden yang segera menerbitkan perppu no 1 tahun 2020, diikuti keppresnya, sebagai paket penyelematan ekonomi dari pemerintah" Pungkas Rafli

Rafli melanjutkan sekarang tinggal bagaimana implementasi perbankan dan lembaga keuangan lainya sebagai satu titik krusial.

"Dunia usaha perlu kepastian agar segera menyusun rencana dan strategi baru dalam upaya penyelematan bisnis yang berdampak pada ekonomi rakyat" Tandasnya

Menurut politisi PKS asal Aceh itu, meskipun banyak data lembaga terpercaya merilis begitu pesimistis akan pertumbuhan ekonomi, kita harus optimis penuh semangat.

"Lebih - lebih BI telah mengijeksi likuiditas ke perbankan lebih dari Rp 400 triliyun, OJK telah melonggarkan kredit, LPS juga telah memiliki aset Rp 128 T, ini skenario cukup baik, tinggal bagaimana implementasi digenjot hingga segera menyentuh sektor riil," tegas Rafli.

Anggota Fraksi PKS Soroti Importasi yang Tinggi pada Bahan Baku Obat, Pangan Dan Alkes

Saya sangat menyayangkan lebih dari 90% bahan baku obat masih impor. Alat kesehatan 95% impor. Begitu juga komoditas pangan semakin mudah impor tanpa rekomendasi

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (29/04) --- Seusai rapat virtual antara Komisi VI dengan Gabungan Pengusaha Farmasi, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Jamu dan Tradisional, Gabungan Makanan dan Minuman (GAPMMI), dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia dalam forum Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU), Anggota Fraksi PKS, Nevi Zuairina menyayangkan regulasi pemerintah yang makin memudahkan importasi bahan baku obat, pangan dan alkes padahal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar pada pengembangan komoditas-komoditas tersebut.

"Saya sangat menyayangkan lebih dari 90% bahan baku obat masih impor. Alat kesehatan 95% impor. Begitu juga komoditas pangan semakin mudah impor tanpa rekomendasi", ucap Nevi.

Legislator Sumbar ini mengatakan, longgarnya aturan impor bahan baku obat, alkes dan pangan ini sebagai akibat telah keluarnya Perpres Nomor 58 Tahun 2020, yang mengatur penyederhanaan impor untuk kebutuhan pangan pokok, cadangan pangan pemerintah, serta bahan baku.

"Seharusnya penyederhanaan impor pangan ini untuk menyelamatkan bangsa dari potensi kerawanan pangan. Namun yang terjadi, keluhan muncul dari berbagai pihak bahwa ancaman hancurnya usaha kecil menengah sektor pangan menjadi semakin terbuka", pungkasnya.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2020 yang diteken pada 8 April 2020 lalu, lanjut Nevi, memang ditetapkan untuk penataan dan penyederhanaan izin impor barang dan bahan baku untuk pencegahan atau penanganan bencana. Namun jika komoditas pangan dan obat seperti jamu ini bila mampu dipenuhi dari dalam, tidak seharusnya dilakukan impor.

"Impor komoditas pangan dan obat yang seharusnya mampu dipenuhi dari dalam negeri, ini sama saja merusak negara dengan alasan menyelamatkan negara", ujar dia.

Politisi PKS ini meminta kepada seluruh asosiasi, yang bermitra dengan komisi VI, agar terus menjalin komunikasi agar saling dapat memberi masukan. Berbagai potensi pengembangan obat tradisional untuk melawan covid-19 dapat terus dilakukan. Semua perlu penelitian dan uji termasuk produksi air rebusan daun sirih yang diduga dapat sebagai alternatif herbal melawan covid 19.

"Obat tradisonal atau Jamu Indonesia lebih diterima karena banyak Sumber DayaAlamnya. tinggal regulasi pemerintah lagi berpihalk pada produk dalam negeri. Jamu tidak boleh kalah dengan produk yang mirip asal tiongkok. Jamu dapat dipastikan Halal. Khusus regulasi pemerintah, kami di Komisi VI akan terus meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan regulasinya. Semoga jamu Indonesia semakin berkualitas dan kedepannya menjadi tuan rumah di negerinya", tutup Nevi Zuairina.

Aleg PKS Minta Pemerintah Mestinya Kembangkan Reagen Corona

Lembaga litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan) tidak boleh hanya berorientasi pada keingintahuan akademik yang produknya hanya paper ilmiah. Tetapi harus lebih konkret, yakni dapat mencari solusi bagi penyelesaian permasalahan strategis bangsa.

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

Tangerang Selatan (02/05) --- Salah satu kendala penanggulangan Covid 19 yang dihadapi Pemerintah Indonesia adalah keterbatasan jumlah reagen untuk melakukan tes metode PCR (polymerase chain reaction).

Reagen merupakan larutan pendukung yang digunakan dalam tes PCR. Tanpa larutan ini, pengujian Corona tersebut tidak dapat dilakukan.

Selama ini reagen diperoleh melalui impor. Jumlah reagen ini sangat terbatas, karena jumlah negara yang memproduksinya juga sangat terbatas. Sementara negara yang membutuhkan sangat banyak.

Menghadapi kondisi tersebut anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah melakukan percepatan upaya pengembangan reagen dalam negeri yang sudah dimulai beberapa waktu lalu.

Mulyanto minta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui LIPI dan BPPT memprioritaskan pengalokasian anggaran dan sumberdaya manusia untuk meneliti berbagai hal terkait upaya percepatan penanggulangan Covid 19, termasuk reagen ini.

Mulyanto menyayangkan jika kemampuan para peneliti kita dengan sarana lab canggih yang dimiliki tidak diarahkan pada pendekatan kebutuhan pasar (market pull), yang digerakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam upaya substitusi impor.

"Lembaga litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan) tidak boleh hanya berorientasi pada keingintahuan akademik yang produknya hanya paper ilmiah. Tetapi harus lebih konkret, yakni dapat mencari solusi bagi penyelesaian permasalahan strategis bangsa. Jangan sebentar-bentar impor dari asing. Perlu ada kebanggaan dan kemampuan memproduksi barang teknologi secara mandiri," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Mulyanto yakin peneliti Indonesia dapat menemukan formula reagen yang tepat. Karena secara kompetensi dan kualifikasi peneliti Indonesia sudah banyak yang memadai. Yang diperlukan saat ini hanya fokus penelitian dan dukungan Pemerintah.

"Kalau pemerintah fokus mendorong, saya yakin BRIN bisa melakukan itu. Pesawat N-250 saja bisa dibuat dan diterbangkan oleh para insinyur kita," tandas Mulyanto

Iskan : Pemerintah Jangan Abai terhadap Keberangkatan Haji Tahun ini

"Informasi yang saya dapat, sekalipun pelaksanaan haji tahun ini tetap berjalan, maka diperkirakan keberangkatan kloter pertama pada tanggal 26 Juni 2020. Maka, sudah sampai sejauh apa persiapan pemerintah? Sehingga keputusan keberangkatan ini, harus segera diambil

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (01/05) --- Calon jamaah haji asal Indonesia harus lebih bersabar menunggu kepastian haji tahun ini ditunda atau berjalan normal.

Rencana semula kepastian pelaksanaan haji 2020 disampaikan pekan keempat April ini sesuai dengan RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag pada (15/04/2020) yang lalu. Tetapi kabar terbaru diundur menjadi (12/05/2020) pekan depan.

Informasi terbaru pelaksanaan haji ini disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali di Jakarta, Kamis, (30/04/2020).

Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menuturkan keputusan berangkat atau tidaknya calon jamaah haji Indonesia tahun ini, harus segera diputuskan oleh Pemerintah.

"Informasi yang saya dapat, sekalipun pelaksanaan haji tahun ini tetap berjalan, maka diperkirakan keberangkatan kloter pertama pada tanggal 26 Juni 2020. Maka, sudah sampai sejauh apa persiapan pemerintah? Sehingga keputusan keberangkatan ini, harus segera diambil," tegas Iskan.

Selain itu, iskan juga mengingatkan Kemenag dalam mempersiapkan calon jamaah haji yang akan berangkat.

"Walaupun ditengah wabah corona ini, pembekalan Haji terhadap jamaah seperti manasik haji, ataupun sosialisasi lainnya harus betul-betul tersampaikan secara komprehensif," lanjutnya.

Iskan juga menyampaikan apabila dilakukan cek, dari kuota yang akan berangkat 220.000 orang Pemerintah bisa melakukan pendataan kesiapan para calon jamaah haji.

"Apakah sudah mendapatkan pembekalan itu secara baik, kan bisa melakukan manasik virtual, atau bagi yang terkendala secara online bisa dilakukan secara offline asal tetap memperhitungkan protokol kesehatan yang berlaku" pungkasnya.

"Jadi, saya minta paling lambat pertengahan ramadhan, pemerintah sudah bisa putuskan haji tahun ini, berangkat atau tidak. Karena aspek kesiapan jamaah haji kita itu yang terpenting. Tidak serta merta harus menunggu pernyataan otoritas Arab saudi." imbuh Iskan.

Politisi PKS ini mengatakan, seandainya haji tahun ini tetap dilaksanakan, pemerintah harus bisa memastikan bahwa tidak ada risiko jemaah dari Indonesia terinfeksi virus Covid-19.

Maka dari itu, Iskan meminta Kemenag memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan.

"Waktu yang ada saat ini, gunakan untuk mengecek dan memastikan secara menyeluruh bahwa calon jamaah haji yang berangkat tahun ini. Pertama ia memang bebas dari Virus Corona, dan yang kedua calon jamaah haji yang berangkat ini tidak berpotensi untuk tertular virus Corona selama di Arab saudi, karena ini akan menimbulkan masalah baru lagi ketika sepulangnya mereka ke tanah air. Maka dari itu Pemerintah dalam hal ini Kemenag harus putuskan secara matang-matang," pungkasnya mengakhiri.

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A

Pemerintah Harus Fokus Tangani Covid-19, Bukan Hanya Tunda Bahas Klaster Ketenagakerjaan

Mestinya Pemerintah prioritaskan penanganan covid-19, sehingga semestinya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan keseluruhan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara menyeluruh, baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya.

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.
Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (28/04) --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengingatkan sesuai dengan keputusan, Presiden Jokowi jadikan Covid-19 sebagai Bencana Nasional, dan bahwa ada banyak hal yang berpotensi bermasalah dalam RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law Cipta Kerja), karenanya mestinya tidak hanya klaster ketenagakerjaan saja yang ditunda pembahasannya.

Menurut pria yang akrab disapa HNW, mestinya Pemerintah prioritaskan penanganan covid-19, sehingga semestinya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan keseluruhan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara menyeluruh, baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya.

Yang diminta untuk ditunda pembahasannya oleh Pemerintah dan Pimpinan DPR hanya klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, itupun setelah mendapat tekanan dari gerakan buruh dan oposisi. Padahal klaster ketenagakerjaan hanya 1 dari 11 klaster lain dalam RUU tersebut yang berpotensi bermasalah dan kontroversi," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/04/2020).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menyebutkan salah satu poin kontroversial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja diantaranya yakni Pasal 170 yang berpotensi menabrak prinsip negara hukum yg diatur dalam UUD NRI 1945. Pasal tersebut tidak berada di klaster ketenagakerjaan yg sudah diminta untuk ditunda pembahasannya.

"Pasal itu mengatur bahwa peraturan pemerintah (PP) dapat membatalkan Undang-undang (UU). Padahal secara hierarkis, PP yang dibuat oleh pemerintah posisinya berada di bawah UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Dan secara hukum PP hadir bukan untuk mengubah UU, melainkan untuk menjalankan UU. Demikian ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2)," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW anggota Komisi VIII DPRRI, menuturkan bahwa pemerintah pernah menyebut adanya kesalahan ketik terkait Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yg sempat

munculkan kritik meluas dari publik. Namun sejak diserahkan ke DPR hingga saat ini, ternyata tidak ada penarikan-koreksi/perbaikan sama sekali. Selain itu bila benar telah terjadi salah ketik, kenapa sampai saat ini belum ada pengusutan terkait pelaku salah ketik tersebut.

"Itu hanya salah satu contoh, tetapi sangat prinsipil. Ada banyak lagi hal yang berpotensi bermasalah dan kontroversi di luar klaster ketenagakerjaan, yang oleh Pemerintah sudah diminta untuk ditunda pembahasannya tersebut" tukasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa sekalipun FPKS sudah memutuskan untuk menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan tidak mengirimkan wakilnya dalam Panja, karena FPKS berpendapat agar Pemerintah dan DPR fokus dan prioritaskan tangani bencana nasional covid-19. Sekalipun demikian FPKS akan terus berjuang agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bermasalah dan kontroversi tersebut ditarik oleh Pemerintah. Selengkapnya di fraksi.pks.id

HNW Dorong Kemenag Tetap Bantu UKT Mahasiswa

Pemotongan anggaran Kemenag oleh Kemenkeu sebesar Rp 2,6 Triliun seharusnya tidak menjadi alasan dibatalkannya diskon UKT bagi mahasiswa PTKIN. Kemenag perlu kreatif mensiasati hal ini. Termasuk memak simalkan pos anggaran Dana Abadi Pendidikan yang dapat dimanfaatkan Kemenag, untuk membantu para mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (01/05) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendukung tuntutan Mahasiswa, dan menyayangkan pembatalan diskon Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk para mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yang sempat jadi edaran dari Kementerian Agama.

Menurutnya, pembatalan kebijakan tersebut meresahkan Mahasiswa, dan dapat menjadi langkah mundur yang tidak solutif sebagai kontribusi atasi dampak wabah Covid-19

"Memang Pemerintah melakukan pemotongan anggaran, termasuk di Kemenag, sebagai upaya mengatasi Covid-19, tapi jangan sampai hal itu malah menambah beban mereka yang terdampak Covid-19, seperti dari kalangan mahasiswa maupun para walinya," demikian disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta (30/04/2020).

HNW yang juga Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS ini juga menjelaskan bahwa pemotongan anggaran Kemenag oleh Kemenkeu sebesar Rp 2,6 Triliun seharusnya tidak menjadi alasan dibatalkannya diskon UKT bagi mahasiswa PTKIN.

"Kemenag perlu kreatif mensiasati hal ini. Termasuk memaksimalkan pos anggaran Dana Abadi Pendidikan yang dapat dimanfaatkan Kemenag, untuk membantu para mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan. Hal ini sudah kami sampaikan langsung kepada Kemenag, pada Rapat Komisi VIII sebelumnya, agar kegiatan pendidikan tidak berhenti, dan peserta didik termasuk mahasiswa tidak menjadi korban berikutnya, akibat wabah Covid-19. Apalagi jika dengan alasan mengatasi Covid-19, justru seharusnya civitas academika PTKIN diperkuat agar mampu berperan dalam pengembangan riset Islami, seperti dulu diwariskan oleh Ibnu Sina, untuk hadirkan ilmuwan Muslim unggulan, agar dapat berkontribusi untuk mengatasi Covid-19. Dan hal tersebut sudah disepakati dalam rapat Komisi VIII dengan Kemenag pada 8/4". ungkap Hidayat.

Hidayat juga mengingatkan Kemenag agar tetap mengakomodasi kebutuhan para mahasiswa demi menjamin keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan PTKIN secara kondusif.

"Walaupun pemotongan UKT tidak sampai 10%, tetapi dengan besaran yang berbeda, ataupun relaksasi pembayarannya, tetap akan sangat membantu para mahasiswa, dan hadirkan kondisi kondusif untuk mrk. Tetapi kalaupun terpaksa UKT tetap normal, maka Kemenag agar memberikan alternatif solusi bantuan, dengan mengarahkan pihak kampus supaya UKT tersebut dialihkan untuk meringankan para mahasiswa dalam kegiatan belajarnya, baik dalam bentuk insentif untuk mahasiswa, maupun bantuan pulsa sebagaimana yang dilakukan beberapa PTN, tetapi penting Kemenag tetap empati dengan kesulitan Mahasiswa karenanya agar Kemenag mengarahkan supaya masing-masing PTKIN membuat kebijakan yg membantu Mahasiswa terdampak covid-19, sesuai kemampuan masinh2 PTKIN". pungkas Hidayat.

SAMPAIKAN

APA ADANYA

Saat ditanya Petugas

> Sampaikan apa adanya, jangan menutupi kebenaran. Kita belajar dari kasus diisolasinya 21 tenaga kesehatan RS Ciremai akibat pasien dan keluarga pasien yang tidak jujur saat berobat akibat sesak nafas setelah sebelumnya kontak fisik dengan mayat pasien positif Covid-19

Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

Image : dpr.go.id | tribunnews.cpm

Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

Legislator PKS: Pastikan Bantuan Luar Negeri Juga Sampai ke Daerah-daerah

Kemampuan daerah untuk mengandalkan APBD masing-masing juga berbeda-beda sementara semuanya sedang butuh. Kita harapkan ada distribusi bantuan terutama dari luar negeri yang bisa menjangkau daerah-daerah itu

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (30/04) --- Presiden Joko Widodo telah menetapkan wabah virus corona sebagai Bencana Nasional. Keadaan Bencana Nasional diikuti dengan bantuan yang mengalir dari negara-negara sahabat dan lembaga internasional untuk Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar penyaluran bantuan dari luar negeri bisa disalurkan secara merata ke seluruh Indonesia. Terlebih kini seluruh Provinsi di Indonesia terdapat kasus positif Corona.

"Penyaluran bantuan dari luar negeri harus diberikan secara merata jangan sampai hanya terkonsentrasi di Jakarta. Bantuan 20 ton alat medis dari Uni Emirat Arab juga baru datang. Kita harapkan distribusinya bisa ke daerah-daerah," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/04/2020).

Mufida mengingatkan saat ini seluruh fasilitas kesehatan dari tingkat pusat hingga daerah sudah memberlakukan protokol penanganan COVID-19. Pemberlakukan protokol ini tentu harus didukung dengan penyediaan logistik berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang mencukupi.

"Kemampuan daerah untuk mengandalkan APBD masing-masing juga berbeda-beda sementara semuanya sedang butuh. Kita harapkan ada distribusi bantuan terutama dari luar negeri yang bisa menjangkau daerah-daerah itu," ungkap Anggota DPR RI dari Dapil II DKI Jakarta ini.

Sudah bukan rahasia lagi jika fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Indonesia tidak tersebar secara merata. Mufida menyitir data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, jumlah persebaran Puskesmas, rumah sakit dan tenaga medis masih berkutat di Pulau Jawa.

"Dalam keadaan normal persebaran faskes kita tidak merata, tentu di saat Pandemi seperti ini lebih-lebih lagi ketimpangannya. Pemerintah Pusat punya kekuatan untuk intervensi pemerataan ini. Keselamatan satu warga dimanapun dia sama nilainya tak peduli dia di kota atau di pelosok desa," ungkap Mufida.

Mufida melanjutkan distribusi bantuan luar negeri secara merata juga dilakukan guna mengantisipasi puncak persebaran virus Corona di daerah.

"Pemerintah kan berani menyebut episentrum bakal bergeser ke Semarang, Surabaya dan Makasar. Mungkin juga daerah lain setelah Jakarta menunjukkan tren yang flat. Jangan sampai kecolongan lagi dengan tidak siap APD, ruang isolasi, ventilator dan kebutuhan lain. Jakarta harus tetap jadi perhatian tapi jangan lupakan daerah lain," ungkap dia.

Pekerja Jadi Korban Covid-19,

Netty: Tunaikan Segera Jaminan Sosialnya

Bayangkan, berapa juta jiwa total anggota keluarga dibalik pekerja PHK dan dirumahkan yang nasibnya harus dipikirkan. Ironis, pada saat momentum hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kita justru melihat nasib para pekerja dilanda situasi penuh keprihatinan

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

"Jangan sampai para pekerja ter PHK, lalu tidak ada perlindungan atas jaminan sosialnya, seperti sudah jatuh tertimpa tangga,"ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat daring Komisi IX dengan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu, (28/4).

Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi Covid-19. Di sektor formal, 1.304.777 pekerja dirumahkan, yang terkena PHK mencapai 241.431 orang. Sedangkan di sektor informal, ada 538.385 pekerja terdampak. Total PHK sekitar 779.816 org dan dirumahkan 1.304.777 orang.

"Bayangkan, berapa juta jiwa total anggota keluarga dibalik pekerja PHK dan dirumahkan yang nasibnya harus dipikirkan. Ironis, pada saat momentum hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kita justru melihat nasib para pekerja dilanda situasi penuh keprihatinan," ungkap anggota Komisi IX ini menanggapi data Kemenaker.

Oleh karena itu, Netty menegaskan agar BPJS Ketenagakerjaan segera membayar klaim jaminan sosial pekerja.

"Bahkan seharusnya pemerintah dapat memberikan insentif atau bantuan pada pekerja yang dapat menjamin mereka bisa survive dalam kondisi saat ini," ujarnya.

Legislator asal Jawa Barat ini juga meminta pemerintah agar memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja sebagai tenaga kesehatan, baik ASN maupun non ASN apabila tergolong ODP, PDP bahkan terkonfirmasi positif Covid-19.

"Apa jaminan perlindungan yang dapat diberikan pemerintah? Apakah dapat dianggap sebagai bentuk kecelakaan kerja sehingga dapat ditunaikan hak mereka?" tanya Netty.

Kelompok lain yang juga perlu dipikirkan perlindungannya adalah para relawan yang resmi terdaftar dalam BNPB.

"Jumlah relawan yang terdata di BNPB ada sebanyak 18.355 orang. Mereka sudah men-dharma bakti-kan dirinya untuk kemanusiaan, maka sepatutnya negara memberikan dukungan berupa perlindungan jaminan sosialnya," lanjut Netty.

Selain itu, kata Netty, kita perlu memikirkan para Pekerja Migran Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.

"Bagaimana pemerintah memberikan jaminan perlindungan pada mereka? Seperti diberitakan tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang kekurangan pasokan makanan dan tidak mendapatkan gaji dari perusahaannya. Apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan mereka," tanya Netty lagi.

Sebagai anggota Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, Netty mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian ketenagakerjaan, atase ketenagakerjaan di Malaysia dan BP2MI agar bisa melakukan respon yang cepat. UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah mengamanatkan agar pemerintah hadir dan melindungi.

"Saya juga sudah meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan dan perlindungan kepada PMI kita di Malaysia. Jangan sampai pemerintah dan BPJS ketenagakerjaan hanya manis

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Selamat
HARI PENDIDIKAN NASIONAL
2 MEI 2020

Pendidikan Berkualitas untuk Bangsa yang Cerdas

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Hari Pendidikan Nasional

Ketua Fraksi PKS DPR: Masih Banyak PR Dunia Pendidikan

Negara harus menempatkan pendidikan pada prioritas tertinggi karena *impact* dan multiflier efeknya terhadap pembangunan nasional di segala bidang tidak terbantahkan

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (2/5) - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para pelajar, guru, dan pendidik di seluruh Indonesia terutama kepada mereka yang tulus mengabdi mencerdaskan generasi bangsa di tengah keterbatasan, pelosoknya medan, sulitnya akses, tidak mencukupinya sarana prasarana, serta minimnya kesejahteraan, bahkan status honorer dengan gaji sangat kecil.

"Kepada mereka semua, Fraksi PKS DPR dan DPRD seluruh Indonesia menaruh hormat dan apresiasi yang tinggi. Dengan segala kerendahan hati itu semua menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan nasional," ungkap Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini mengakui jika pendidikan nasional masih dihadapkan pada banyak permsalahan dan pekerjaan rumah. Bukan hanya dari aspek kualitas kurikulum yang mampu mencetak siswa didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi juga menyangkut kecukupan sarana prasarana, disparitas standar dan kualitas, angka putus sekolah, dan tidak kalah penting kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

"Permasalahan tersebut sebagian sudah bertahun-tahun menjadi PR dan perlahan kita benahi dan perjuangkan lewat legislasi dan kebijakan pemerintah. Ada yang berhasil, ada pula yang terkendala. Tapi kami menyimpulkan faktor determinannya ada pada kemauan politik atau politicall will," tandas Jazuli.

Ketua Fraksi PKS DPR ini mengatakan sikap Fraksinya insya Allah jelas dan tegas soal dunia pendidikan. Pertama, kurikulum harus mencerminkan visi pembentukan karakter siswa yang cerdas iptek, imtak, dan berwawasan kebangsaan. Di sini antara lain pentingnya pengajaran kembali nilai-nilai moral Pancasila dan pemerataan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan kemajuan dunia pendidikan.

Kedua, untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dibutuhkan guru, pendidik, dan dosen yang terus meningkat kualitasnya dan terjamin kesejahteraannya. Di sini sikap Fraksi PKS tegas meminta negara mengangkat seluruh guru honorer. Meningkatkan tunjangan guru dan dosen. Serta membekali guru dengan pelatihan dan keterampilan (sertifikasi) yang menunjang profesionalismenya sebagai pendidik generasi bangsa.

Ketiga, pendidikan berkualitas juga membutuhkan sarana prasarana yang memadai mulai dari kecukupan bahan ajar dan buku-buku, kelaikan sekolah dan ruang kelas, hingga kelengkapan yang layak bagi seluruh siswa didik. Dan hal itu harus dipenuhi secara merata hingga pelosok-pelosok daerah. Fraksi PKS sedih dan trenyuh menemukan banyak sekolah tidak layak bahkan nyaris roboh di sejumlah daerah. Kontras sekali dengan kebanyakan sekolah di pusat kota dan pemerintahan. Hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah.

Keempat, akses terhadap pendidikan harus terbuka luas bagi seluruh anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara, hak anak-anak, dan negara wajib memenuhinya. Untuk itu Fraksi PKS tegas mendorong pemerintah menuntaskan program wajib belajar serta memperluas akses pendidikan melalui pendidikan gratis dan beasiswa hingga pendidikan tinggi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Momentum Hardiknas

SIKAP FRAKSI PKS TENTANG DUNIA PENDIDIKAN

1. Kurikulum harus mencerminkan visi pembentukan karakter siswa yang cerdas iptek, imtak, dan berwawasan kebangsaan

2. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dibutuhkan guru, pendidik, dan dosen yang terus meningkat kualitasnya dan terjamin kesejahteraannya. Di sini sikap Fraksi PKS tegas meminta negara mengangkat seluruh guru honorer. Meningkatkan tunjangan guru dan dosen. Serta membekali guru dengan pelatihan dan keterampilan (sertifikasi) yang menunjang profesionalismenya sebagai pendidik generasi bangsa

3. Pendidikan berkualitas juga membutuhkan sarana prasarana yang memadai mulai dari kecukupan bahan ajar dan buku-buku, kelaikan sekolah dan ruang kelas, hingga kelengkapan yang layak bagi seluruh siswa didik. Dan hal itu harus dipenuhi secara merata hingga pelosok-pelosok daerah

4. Akses terhadap pendidikan harus terbuka luas bagi seluruh anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara, hak anak-anak, dan negara wajib memenuhinya. Untuk itu Fraksi PKS tegas mendorong pemerintah menuntaskan program wajib belajar serta memperluas akses pendidikan melalui pendidikan gratis dan beasiswa hingga pendidikan tinggi.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Kepada mereka semua, Fraksi PKS DPR dan DPRD seluruh Indonesia menaruh hormat dan apresiasi yang tinggi. Dengan segala kerendahan hati itu semua menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan nasional

Ledia Usulkan Libatkan Mahasiswa dalam Penyiapan Bahan Ajar Sekolah

Insya Allah ini bisa menjadi solusi bersama untuk mempercepat ketersediaan bahan ajar yang siap tayang di TVRI. Bagi mahasiswa kegiatan ini bisa menjadi pengganti magang atau salah satu komponen penilaian tugas akhir

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (28/04) --- Pandemik Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir membutuhkan persiapan yang terencana dan berkesinambungan, termasuk penyediaan bahan ajar untuk mengantisipasi bila Program Belajar Jarak Jauh masih akan diperpanjang waktunya.

Hal ini diingatkan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, usai melakukan rapat jarak jauh dengan pimpinan TVRI, Senin (27/04/2020).

"Info yang kami terima, Pustekkom Kemdikbud sampai saat ini belum bisa menyediakan bahan ajar yang siap untuk ditayangkan TVRI untuk jadual lebih dari 3 bulan, padahal kita tidak tahu kapan pandemik ini akan berakhir, sehingga ada kemungkinan masa anak didik belajar dari rumah masih akan diperpanjang. Kalau demikian maka ketidaksiapan tayangan bahan ajar bisa menjadi problem tersendiri terutama bagi pendidik dan anak didik di pelosok," kata Ledia

Sementara itu Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud, Muhammad Hamid, menyatakan kepada media bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri saat ini tengah mempersiapkan skenario belajar dari rumah bila Program Belajar Jarak Jauh harus diperpanjang sampai akhir tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut menurut Ledia, Kemendikbud tentulah harus ngebut mempersiapkan bahan ajar yang siap tayang bagi siswa didik untuk jangka panjang juga, minimal sesuai dengan penyiapan skenario belajar di rumah sampai akhir tahun.

"Lebih baik sudah siap dengan bahan ajar untuk program belajar dari rumah lalu ternyata kita mengalami recovery lebih cepat, daripada tidak siap lalu tergesa-gesa dan hasilnya tidak maksimal." katanya

Sebagai salah satu langkah membantu percepatan penyediaan bahan ajar, Sekretaris Fraksi PKS ini lantas mengusulkan agar mahasiswa bisa dilibatkan. Hal ini sekaligus merupakan tantangan bagi implementasi konsep Kampus Merdeka yang digagas Menteri Nadiem Makarim.

"Mahasiswa bisa diberi penugasan membuat bahan animasi/audio visual sebagai bahan tayangan materi pembelajaran. Isi substansinya adalah bahan dari Kemendikbud, hasilnya direview oleh dosen, kampus dan Pustekkom. Selain menjadi nilai tersendiri bagi mahasiswa, tayangan yang berkualitas baik bisa ditampilkan di TVRI. Hal ini tentu membantu Pustekkom memiliki suplai bahan ajar yang cukup sekaligus memberikan nilai plus bagi mahasiswa." sambungnya

Dalam konsep Kampus Merdeka ala Nadiem, mahasiswa memang diberi keluwesan dalam menjalani perkuliahan. Belajar lintas prodi, belajar di luar kampus hingga magang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penilaian yang menunjang kelulusan.

Karenanya Ledia yakin ide melibatkan mahasiswa dalam penyiapan bahan ajar merupakan satu wujud implementasi Kampus Merdeka.

"Insya Allah ini bisa menjadi solusi bersama untuk mempercepat ketersediaan bahan ajar yang siap tayang di TVRI. Bagi mahasiswa kegiatan ini bisa menjadi pengganti magang atau salah satu komponen penilaian tugas akhir, juga menjadi bahan dokumentasi bagi Pustekkom dan TVRI serta bahan ajar bagi peserta didik di seluruh Tanah Air." tutup Ledia

OPINI

Selasa 28 April 2020

PKS & Visi Pendidikan Nasional

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Foto : Media Indonesia

PKS & Visi Pendidikan Nasional

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M.,M.Ed
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS

Pendidikan memiliki peran dan kontribusi penting dalam mewujudkan bangsa yang tangguh dan bermartabat. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yang menegaskan: “Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” Diperlukan pendidikan yang bermutu untuk dapat mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) menetapkan , "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Pendidikan bermutu akan menemukan wujudnya yang nyata manakala hakikat dan tujuan pendidikan yang sebenarnya dapat tercapai dengan baik, sebagaimana telah diamanahkan dalam UU No 20/ 2003 Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandir dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Diperlukan pendidikan yang bermutu untuk dapat mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) menetapkan, "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Namun sejauh ini, kami memandang bahwa Pendidikan Nasional masih berkutat dengan sejumlah masalah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sekaligus memberikan gambaran rata-rata kualitas intelektual penduduk indonesia. Pada periode 2010-2014 terjadi peningkatan dari 7,93 tahun menjadi 9 tahun. Meski meningkat, tetapi rata-rata penduduk Indonesia hanya mengalami sekolah selama 9 tahun, yaitu hanya sampai akhir kelas 3 SMP. Sampai 2018,

PKS & Visi Pendidikan Nasional hal 2

SISWA PENDIDIKAN DASAR
Foto : istimewa

Pada periode 2010-2014 terjadi peningkatan dari 7,93 tahun menjadi 9 tahun. Meski meningkat, tetapi rata-rata penduduk Indonesia hanya mengalami sekolah selama 9 tahun, yaitu hanya sampai akhir kelas 3 SMP. Sampai 2018, yang laki-laki baru sampai 8,62 tahun, sedangkan yang perempuan baru sampai 7,72 tahun. Artinya, gap antara harapan dan realisasinya masih cukup jauh.

yang laki-laki baru sampai 8,62 tahun, sedangkan yang perempuan baru sampai 7,72 tahun. Artinya, gap antara harapan dan realisasinya masih cukup jauh.

Sebuah laporan investigasi yang didasarkan atas hasil survei lembaga Pearson, menyebutkan penyebab terpuruknya sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah buruknya tingkat kompetensi guru yang mengajar di sekolah. Dilaporkan, bahwa hanya sekitar separuh atau 51 persen guru yang mengajar di Indonesia memiliki kompetensi yang tepat untuk dapat mengajar dengan baik dan profesional. Uji kompetensi guru yang dilakukan Kemendikbud (2015) mengkonfirmasi temuan itu. Berdasarkan data hasil uji kompetensi awal (UKA) guru sebelum mendapatkan sertifikat profesional guru, maka diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata nasional adalah 53.05 untuk skala nilai 0-100. Artinya, nilai rata-rata nasional tingkat kompetensi guru masih rendah, hanya separuh dari angka ideal.

Selain krisis tenaga pendidik (guru), kerapuhan sistem pendidikan nasional disebabkan belum mapannya sistem kurikulum nasional. Perombakan kurikulum yang selalu terjadi pada setiap pergantian rezim menyebabkan penyelenggaraan pendidikan nasional tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Saat ini, pendidikan nasional mengalami kegamangan dan ketidaksiapan melaksanakan perbaikan dan pembaharuan kurikulum, sehingga berdampak kepada perdebatan dan kontroversi yang berkepanjangan. Mutu lulusan pendidikan pun menjadi rendah, belum mampu bersaing dengan negara lain. Mereka yang lulus dengan pengetahuan dan keterampilan terbatas selanjutnya tak bisa tertampung dalam dunia kerja. Dalam konteks global, lemahnya lembaga pendidikan nasional berdampak pada lemahnya daya saing SDM kita di pasar global, sehingga kita hanya mampu mengekspor tenaga kerja yang tak terampil ke mancanegara.

Pemerintahan Jokowi yang telah berlangsung sejak Oktober 2014, sejauh ini belum mampu membangkitkan mutu pendidikan nasional. Pendidikan Nasional masih jalan di tempat, belum terlihat terobosan kebijakan yang nampak nyata perbaikannya. Pemerintah masih sibuk dengan perubahan-perubahan yang bersifat minor, belum menyentuh perubahan yang mendasar, yaitu arah pendidikan nasional (kurikulum) , kecukupan jumlah dan kemampuan guru, serta kelayakan infrastruktur (sarana/prasarana pendidikan). Kementerian Pendidikan & Kebudayaan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan nasional sejauh ini masih bersibuk diri terhadap issue-issue seputar pembelajaran (merdeka belajar, kampus merdeka), penggantian format UN, format zonasi sekolah dalam PPDB, yang semuanya bukan merupakan solusi yang substantif. Musibah Covid-19 yang kemudian memaksa adanya penerapan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), malah menyingkap lebih serius lagi, betapa belum siapnya pendidikan kita menghadapi era digital.

Partai Keadilan Sejahtera, sejak lahirnya telah menempatkan posisi dan peran strategis Pendidikan sebagai pintu gerbang menuju peradaban. Sebagai entitas politik yang berjuang membangun peradaban, PKS telah menetapkan Visi Pendidikannya, sebagaimana yang termaktub dalam Platform Pembangunan PKS: “Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Membangun sistem pendidikan

PKS & Visi Pendidikan Nasional Tamat

nasional yang efektif dan bermutu dalam lingkungan belajar yang kondusif untuk melahirkan peserta didik yang cerdas, taqwa, mandiri dan memiliki daya saing tinggi, siap membela harkat/martabat agama, bangsa dan negara". Pendidikan Nasional yang divisikan oleh PKS adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan.

Bagi Partai Keadilan Sejahtera Pendidikan harus diselenggarakan melalui serangkaian proses terencana dan teratur, diakukan secara sistematis untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia secara menyeluruh (holistik). Pendidikan menjadi sokoguru bagi pembangunan akhlaq dan budaya bangsa. Pembangunan pendidikan nasional yang komprehensif dan integratif meliputi pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan Nasional harus mampu menyiapkan anugerah melimpahnya jumlah penduduk usia produktif di era 2020-2030 (bonus demografi), dengan arah kebijakan pendidikan yang memastikan kemampuan, keterampilan, kreativitas, inovasi dan kemandirian mereka. Pendidikan harus didesain sejak dini, agar setiap penduduk usia sekolah mendapatkan akses, dan kemudahan mendapatkan pendidikan. PKS bersama seluruh elemen bangsa bertekad untuk terus memperjuangkan perbaikan dan pembangunan pendidikan nasional yang lebih baik dengan arah kebijakan yang tepat,

> Pendidikan Nasional yang divisikan oleh PKS adalah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan.

PRESIDEN PKS SAAT BERSAMA SISWA SMA
Foto : M. Hilal

Program Pelatihan Online Abaikan Lembaga Dikmas, Fikri Faqih: Menyakitkan!

kini publik dengan gamblang bisa menilai keberpihakan pemerintah, khususnya saat menghadapi krisis multidimensi yang timbul dari pandemi Covid-19. Kebijakan yang tidak peka dan diwarnai KKN menyebabkan krisis ketidak-percayaan kepada istana yang lebih luas

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (01/05) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyayangkan program pelatihan daring (online) yang dibungkus dalam Program kartu pra kerja sebanyak 5,6 juta penerima, mengabaikan keberadaan sekolah berbasis pendidikan masyarakat (Dikmas) di tanah air.

"Padahal ada puluhan ribu lembaga yang sudah berkecimpung dalam pendidikan dan pelatihan yang sudah bertahuntahun eksis di masyarakat, menyakitkan melihat fakta bahwa mereka diabaikan," kata Fikri di Semarang, Jumat (01/05).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini merinci data terkait satuan pendidikan berbasis pendidikan masyarakat (Dikmas) di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud.go.id).

Data itu menyebut ada 9.390 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), 9.537 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta terdapat 433 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tersebar di seluruh Indonesia. "Totalnya ada 19.360 lembaga," imbuh Fikri.

Selain itu, terdapat 6 ribuan Lembaga pelatihan dan keterampilan yang berada di bawah binaan Kemenaker. Dengan data tersebut, diperkirakan terdapat 250-an ribu pekerja yang menggantungkan hidupnya sebagai pengajar dan instruktur di lembaga-lembaga tersebut.

Fikri mempertanyakan alasan pemerintah yang hanya mengandeng delapan perusahaan platform digital yang sudah mapan secara finansial. Mitra platform ini kabarnya hanya mengandeng 200-an lembaga kursus.

"Padahal ada 19 ribuan Lembaga dikmas milik anak negeri ini yang kesulitan di masa pandemi," kata Fikri.

Selain itu, Fikri menilai kebijakan yang telah diambil pemerintah tersebut diwarnai konflik kepentingan.

"Aksi nepotisme oleh staf-sus istana tidak bisa dilupakan begitu saja meski oknumnya sudah mundur," kata Fikri.

Menurut Fikri, kini publik dengan gamblang bisa menilai keberpihakan pemerintah, khususnya saat menghadapi krisis multidimensi yang timbul dari pandemi Covid-19.

"Kebijakan yang tidak peka dan diwarnai KKN menyebabkan krisis ketidak-percayaan kepada istana yang lebih luas," katanya.

Karenanya, Fikri juga mengusulkan agar sistem pengawasan internal pemerintah diterjunkan untuk mengawasi proses yang tengah berjalan.

"Meski agak terlambat, mestinya juga dilibatkan pendampingan BPKP,LKPP, juga Itjen dalam proses kartu prakerja ini," pungkasnya.

Pelibatan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LPKP), serta Inspektorat Jenderal (Itjen) dikatakan Fikri, untuk meredam kegaduhan yang sudah timbul akibat pelaksanaan program kartu pra-kerja.

"BPKP, LKPP, dan Itjen harus aktif mencermati proses pengadaan barang jasa di kartu prakerja agar tdk terjadi kegaduhan dan menyakiti hati lembaga-lembaga kursus di bawah binaan Kemendikbud. Sebagian toh sudah digitalisasi," tutur Fikri.

Pemerintah sebelumnya merilis paket stimulus ekonomi di masa pandemi Covid-19 sebesar Rp. 405,1 T.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

Anggaran Pemindahan Ibukota Dialihkan

Anis Ingatkan Pemerintah Agar Tepat Sasaran

Agar pemerintah membuat perencanaan dan system yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Foto : dpr.go.id

Anggaran Pemindahan Ibukota Dialihkan

Anis Ingatkan Pemerintah Agar Tepat Sasaran

"Pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (28/04) --- Anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibukota baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Menurut Menkeu, selain anggaran dasar infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. Hal itu disampaikan Menkeu pada Kamis, (23/04/2020).

Politisi PKS Anis Byarwati memberikan apresiasi atas pernyataan Menkeu tersebut. Anis yang merupakan anggota komisi XI DPR RI, telah menyuarakan gagasan penundaan penyiapan proyek ibu kota baru agar anggaran dan kerja pemerintah bisa difokuskan pada penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 sejak 3 April 2020.

Kepada awak media saat itu, Anis mengatakan segera tarik Omnibus Law Cipta Kerja, dan tunda agenda pemindahan ibu kota. Gunakan anggarannya untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi rakyat.

Menurut Anis, 89,472 triliun anggaran persiapan pemindahan ibu kota baru dalam APBN 2020 akan sangat berarti jika dialihkan penggunaannya untuk penanganan dan penanggulangan pandemik Covid-19, yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat banyak.

"Dana sejumlah 89,4 triliun itu, sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,"tuturnya.

Namun demikian, terkait dengan kebijakan pengalihan anggaran ibukota baru yang dilakukan menkeu, Anis memberikan catatan khusus.

"Pengalihan anggaran ini harus benar-benar digunakan tepat sasaran. Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak," katanya di Jakarta (26/04/2020).

Anis menekankan agar pemerintah membuat perencanaan dan system yang baik, agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemic Covid-19 ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang terdampak dan berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan," pungkasnya.

Tren Rupiah Menguat

Aleg PKS: Kenapa Pemerintah Pesimis?

Selama pengelolaan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia hanya berfokus pada sisi moneter maka selalu berbiaya mahal. Indonesia akan selalu dalam posisi sulit

H. HIDAYATULLAH, S.E.
Anggota Komisi XI DPR RI

Medan (01/05) --- Anggota DPR Komisi XI DPR RI Hidayatullah menyatakan ada tren penguatan rupiah sepanjang bulan april 2020 ini.

"Tetapi kenapa pemerintah menetapkan asumsi makro rupiah begitu tinggi, sebesar Rp 17.500 terhadap Dollar, terkesan pemerintah pesimis," kata Hidayatullah di Medan (01/05/2020).

Legislator dapil Sumatra Utara ini mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI) yang mampu menjaga nilai rupiah mengatasi persoalan depresiasi rupiah meski dalam kondisi pandemi corona yang semakin meluas.

"Bank sentral harus tetap cermat dan hemat amunisi, karena sumber devisa semakin terbatas akibat pelemahan ekspor dan investasi," ujar Hidayatullah.

Cadangan devisa saat ini seringkali menjadi bumper terakhir dalam menjaga stabilitas mata uang domestik.

"Selama pengelolaan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia hanya berfokus pada sisi moneter maka selalu berbiaya mahal. Indonesia akan selalu dalam posisi sulit," ujar anggota Fraksi PKS tersebut.

Data Bank Indonesia menunjukkan cadangan devisa Indonesia menurun pada akhir Maret, sehingga tinggal US$120,9 miliar. Pada bulan Februari sempat tercatat US$130,4 miliar.

Hidayatullah menjelaskan bahwa yang paling utama justru adalah upaya perbaikan sektor riil dan reformasi struktural. "Ini yang belum terlihat signifikan dikerjakan, pemerintah cenderung menyalahkan faktor global," kata Hidayatullah.

Dengan target asumsi makro nilai tukar rupiah demikian Hidayatullah menyarankan pemerintah bekerja serius dan harus optimis rupiah bisa lebih kuat lagi.

"Kedepan Bauran kebijakan BI harus lebih mengutamakan menguatnya sektor riil, sudahi era bubble economic" pungkasnya.

Wakil Ketua FPKS: Perppu No 1 Tahun 2020 Berpotensi Melanggar Konstitusi

Perppu ini berpotensi melanggar konstitusi. Terdapat sejumlah pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD NRI 1945. Terutama terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara"

H. ECKY AWAL MUCHARAM
Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (02/05) --- Badan Anggaran DPR RI akan mengelar Rapat Kerja untuk pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada Senin, (04/05/2020).

Dalam Rapat Kerja akan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur BI, Ketua OJK, dan Ketua LPS termasuk dengan rencana agenda pengambilan keputusan atas RUU tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2020.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menilai Perpu No. 1 tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi.

"Perppu ini berpotensi melanggar konstitusi. Terdapat sejumlah pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD NRI 1945. Terutama terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara", paparnya.

Ecky menilai sejumlah pasal Perppu terkait dengan APBN terutama Pasal 12 ayat 2 dimana Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

"Pasal ini jelas mengampu-tasi kewenangan peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-Undang atau yang setara", tegasnya.

Ecky menjelaskan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Dan RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3.

"Konstitusinya sudah jelas. Jadi yang sudah berjalan ini cenderung bertentangan dengan konstitusi", tambahnya.

Hal kedua yang menurutnya berpotensi melanggar konstitusi adalah terkait imunitas pengambil kebijakan. Perppu Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas

didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

"Ini jelas bertentangan dengan prinsip supermasi hukum dan prinsip negara hukum. Padahal UUD NRI Tahun 1945 melalui perubahan pertama tahun 1999 sampai perubahan keempat tahun 2002, telah menjamin tegaknya prinsip-prinsip supremasi hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan adanya pengakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D. Ini sudah jelas", tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Hermanto Ingatkan Pemerintah: Cetak Uang Baru Tidak Relevan

Uang banyak beredar tapi barang langka dan tidak disertai produktivitas nasional. Itulah sumber petaka inflasi bahkan hiperinflasi

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota BANGGAR DPR RI

Padang (03/05) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hermanto, menyoroti rencana pemerintah mencetak uang baru saat ini yang sangat tidak relevan, mengingat underlaying dan ekonomi nasional tidak memungkinkan untuk itu.

Menurut Hermanto, Tradisi negara-negara di dunia dalam mencetak uang didasarkan pada dua hal yaitu: cadangan emas yang dimiliki negara atau fiat money (perintah negara atau regulasi).

"Indonesia hanya memiliki cadangan emas 78,5 ton, berada dibawah Singapura 127, 4 ton apalagi Amerika 8.133,5 ton. Indonesia tidak termasuk 35 negara pemilik cadangan emas terbesar", pungkasnya.

Hermanto menambahkan rencana pemerintah akan mencetak uang 600 triliun nampaknya lebih didasarkan pada fiat money. Bukan cadangan emas. Negara tidak memiliki emas yang kuat untuk menggaransi cetak uang.

"Hal tersebut sangat jelas keterkaitannya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Penggganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan", terang Anggota Komisi IV DPR ini.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga mengatakan cetak uang baru berdasarkan fiat money akan sangat membahayakan ekonomi nasional karena tidak didukung underleying yang kuat. Juga sangat kompleks bila cetak uang baru sebagai basis menyusun APBN. Cetak uang baru dengan dasar fiat money akan mengundang sumber penyebab inflasi yaitu: uang beredar semakin banyak, nilai tukar uang menurun, perilaku konsumtif, daya beli masyarakat rendah dan kelangkaan barang.

"Uang banyak beredar tapi barang langka dan tidak disertai produktivitas nasional. Itulah sumber petaka inflasi bahkan hiperinflasi. Dalam menguatkan pondasi ekonomi nasional ditengah pandemik Covid-19, ada baiknya Pemerintah mengkonversi anggaran pembangunan IKN (ibukota negara) dan infrastruktur yang belum ada manfaatnya dalam jangka pendek dialihkan untuk keperluan peningkatan produktivitas nasional yang mendesak yaitu: pangan, mencegah covid-19, UMKM dan sektor riil", tuturnya.

Cetak uang baru, kata Hermanto, atas dasar fiat money akan mengundang moral hazard. Potensi perilaku koruptif semakin sulit dikendalikan. Apalagi didukung dengan Perppu No. 1 tahun 2020 dimana para pemangku pengambil kebijakan kebal hukum. Tidak akan dituntut pidana sekalipun ada tindak pidana dalam kebijakan.

"Siapa yang diuntungkan dengan cetak uang 600 triliun ? Dalam kondisi pandemik Covid-19 dan ekonomi saat ini, cetak uang baru tidak menguntungkan bagi ekonomi rakyat. Bisa jadi yang diuntungkan adalah: pengusaha besar, para importir dan industri besar yang menguasai sektor manufaktur, barang dan jasa, perbankan serta petambang emas," tandasnya.

Untuk jangka menengah dan panjang, lanjut Hermanto, pemerintah perlu memperkuat cadangan emas milik negara dengan cara memberikan alokasi teknologi modern untuk petambang emas rakyat dan tidak memberikan kesempatan investasi asing menguasai tambang emas karena hasilnya akan menjadi milik negara investor.

"Deposit emas di Indonesia masih banyak. Ada baiknya bila seluruhnya dikelola oleh anak bangsa untuk memperkuat cadangan emas negara", tutup Hermanto.

Fraksi PKS mengusulkan agar TAP MPRS No. 25/1966 jadi landasan dalam RUU HIP

Untuk mendapat penerimaan yang luas dari masyarakat dan benar-benar memenuhi aspirasi dari seluruh komponen bangsa, maka RUU HIP ini tidak boleh dipertentangkan antara prinsip "ketuhanan" dan prinsip "kebangsaan"

Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota BALEG DPR RI

Jakarta (03/05) --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyampaikan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengusulkan TAP MPRS No.25/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai bagian dari konsiderans "Mengingat" dalam landasan Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Draft RUU HIP ini tidak memasukkan ketentuan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai bagian dari konsiderans "Mengingat"," ungkap Mulyanto pada Ahad (03/05) di Jakarta.

Mulyanto menjelaskan TAP MPRS yang masih berlaku ini sangat penting dan relevan untuk dapat melindungi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari pengaruh faham atau ajaran Komunisme/Marxisme Leninisme di tengah percaturan politik regional maupun global dalam perang dagang dan politik antara state capitalism dan corporate capitalism.

Bahwa Pancasila yang dimaksud dalam RUU HIP ini lebih dimaksudkan dan ditekankan pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan pada Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sehingga secara eksplisit muncul pasal terkait dengan "Trisila" dan "Ekasila". Dimana, 5 sila (Pancasila) diperas menjadi 3 sila (Trisila), dan kemudian diperas lagi menjadi hanya 1 sila (Ekasila), yaitu gotong-royong.

"Draft RUU HIP ini cenderung meletakkan agama sebagai instrumen pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta dapat ditafsirkan menihilkan sila-sila yang lain dalam Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan konsensus nasional para founding fathers," ujar doktor lulusan Jepang ini.

Legislator asal Banten ini juga memaparkan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila harus disampaikan secara lengkap dan utuh, sesuai dengan yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945; serta tidak boleh menjadi alat indoktrinasi sebagai ideologi tertutup yang mereduksi HAM, apalagi dilaksanakan dengan pendekatan security, sebagaimana yang pernah dialami di Era Orde Baru.

Mencabut dan menghapuskan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 6 terkait dengan Trisila dan Ekasila. Karena, dalam sejarah ketatanegaraan kita, sebagaimana yang terjadi dalam rapat-rapat BPUPKI juga dalam rapat-rapat PPKI, berbagai pandangan founding father tentang trisila dan ekasila telah diperkaya dan dirumuskan dalam formula yang lebih komprehensif.

"Untuk mendapat penerimaan yang luas dari masyarakat dan benar-benar memenuhi aspirasi dari seluruh komponen bangsa, maka RUU HIP ini tidak boleh dipertentangkan antara prinsip "ketuhanan" dan prinsip "kebangsaan", pungkasnya. Selengkapnya di fraksi.pks.id

Pemerintah Tidak Cermat Menyusun Omnibus Law RUU Cipta Kerja

pembahasan RUU tersebut di DPR terkesan dipaksakan, apalagi secara teknis pembahasan masih terdapat banyak kekurangan.

KH. BUKHORI, Lc., M.A
Anggota BALEG DPR RI

Jakarta (04/05) --- Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 174 pasal berikut dengan turunan ayat yang banyak sehingga mencapai 1029 halaman, memberikan dampak pada 79 undang-undang eksisting.

Menurutnya, pembahasan RUU tersebut di DPR terkesan dipaksakan, apalagi secara teknis pembahasan masih terdapat banyak kekurangan.

Selain itu, Bukhori juga mencurigai beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja, secara terselubung, membuka ruang bagi penumpang gelap lain untuk menjalankan kepentingannya melalui sejumlah pasal baru yang diatur.

Ia mengambil contoh terkait perubahan pada pasal 17 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diatur dalam pasal 18 RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, pasal dalam RUU tersebut tidak ramah lingkungan karena menghilangkan ketentuan minimal 30% fungsi kawasan hutan pada tiap wilayah provinsi/ Daerah Aliran Sungai.

"Perubahan pada pasal 17 ayat (5) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menghapus ketentuan paling sedikit 30% untuk fungsi konservasi mendorong pembangunan yang abai terhadap aspek pelestarian lingkungan. Jika dibiarkan, kawasan hijau kita akan hilang akibat tergerus oleh proyek pembangunan sehingga bencana ekologis sulit terhindarkan. Pada akhirnya, masyarakat sekitar yang dirugikan" ungkap Bukhori selepas forum diskusi internal PKS terkait RUU Omnibus Law Ciptaker di Jakarta, Minggu (03/05/2020)

Anggota Komisi VIII ini juga mengusulkan agar tidak mengunci pembangunan dan tetap dapat mempertahankan fungsi konservasi wilayah, sebaiknya rumusan angka 30% tersebut tidak membatas pada kawasan hutan semata, tetapi bisa ditambahkan ruang terbuka hijau (RTH), taman, dan/atau sawah.

"Kita bisa memahami bahwa latar belakang penghapusan 30% ini tidak lepas dari alasan banyaknya izin pembangunan di daerah yang terhambat, termasuk redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan. Oleh sebab itu, kami coba tawarkan win-win solution, dimana ketentuan 30% untuk pelestarian lingkungan pemanfaatanya dapat berupa RTH, sawah, taman, dst." sambungnya

Bukhori menambahkan, Pemerintah perlu lebih cermat dalam menyusun RUU ini. Ia bahkan menyinggung draft rumusan yang belum selesai di pasal 59 RUU Cipta Kerja mengenai perubahan terhadap pasal 295 UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

"Pemerintah tampak tergesa-gesa dalam menyusun RUU ini. Buktinya, lihat perubahan pada pasal 295 ayat (3), draft rumusannya berbunyi seperti ini "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana..". Nah, itu terhenti pada kata sebagaimana. Silakan periksa sendiri di draftnya. " ujar Bukhori.

Politisi PKS ini mencemaskan jika dalam proses penyusunan RUU ini saja dilakukan secara gegabah, maka tidak menutup kemungkinan dalam implimentasinya akan mengundang lebih banyak masalah

Tantangan Geopolitik Semakin Berat, Generasi Muda Harus Bersiap

hami Indonesia tidak bisa dilihat dari perspektif internal saja, tetapi juga harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni perspektif geopolitik. Ini dalam ilmu politik disebut geopolitik. Dari langkah2 geografis itu kita bisa mengambil keuntungan politik"

AGUS PURNOMO, SIP
Tim Ahli Fraksi PKS DPR RI

Mantan Anggota DPR RI dari PKS, Agus Purnomo, menuturkan bahwa memahami Indonesia tidak bisa dilihat dari perspektif internal saja, tetapi juga harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni perspektif geopolitik.

"Ini dalam ilmu politik disebut geopolitik. Dari langkah2 geografis itu kita bisa mengambil keuntungan politik" ujar Agus Purnomo dalam diskusi online tentang lanskap politik Indonesia pasca Covid 19 Senin, (5/5)

Menurut Agus, hampir semua peristiwa-peristiwa besar didunia termasuk Pandemi Covid-19 memiliki penjelasan geopolitiknya. Begitupula dengan persaingan kekuatan global yang akhir-akhir ini sering terjadi, seperti antara US dengan China,

"Pada kasus RRC, mereka sedang mengupayakan lebensraum, yakni ruang hidup yang lebih luas. Karena itu, RRC berupaya mengklaim Taiwan kemudian Kepulauan Spratly. Bisa jadi nantinya akan ribut dengan Indonesia di Laut Cina Selatan" ujar Agus Purnomo.

Karena itu, menurut Agus Purnomo, Geopolitik sarat dengan analisis yang multidimensi guna memahami fenomena tersebut. Ini dimulai dengan siapa saja aktor yang berperan hingga adanya fakta bahwa persaingan antara aktor negara dengan non negara kian menguat.

" Misalnya, di Indonesia saat ini ada keterbelahan masyarakat akibat adanya persaingan antara aktor negara dengan non negara. Dan ini bukan saja ada di Indonesia saja, melainkan di negara-negara lain juga." ujar Agus Purnomo.

Keterbelahan masyarakat ini nantinya akan mengancam Indonesia, karena memperlemah kontrol terhadap zona geografis yang dimilikinya. Guna mengantisipasi hal tersebut, Indonesia harus memiliki kontrol yang kuat dan ini butuh koordinasi antara stakeholder keamanan.

Di sisi lain, Indonesia memiliki keuntungan secara geografis. Hal ini berakibat pada potensi SDA Indonesia yang melimpah, terutama di sumber daya kelautan.

"Jepang itu iri sebenarnya sama kita. Kalian bayangkan, Ikan Tuna yang mahal itu banyak yang bertelur di Jepang, tetapi besar dan panennya malah di Maluku karena kondisi iklimnya cocok. Karena itulah, kita sudah harus punya kesadaran geografis dari sekarang, apalagi ketika kita menjadi pemimpin politik" ujar Agus Purnomo.

Apalagi, Al Quran sudah mengajarkan kesadaran geografis. Ini terbukti dengan diturunkannya Surah Ar-Rum, yang menceritakan kemenangan Romawi atas Persia. Padahal, surat ini diturunkan di masa dimana Rasulullah saw belum memiliki kekuasaan. Seolah-olah Al Quran meminta kita untuk merenungkan hal tersebut.

Terakhir, Agus Purnomo meminta generasi muda untuk mempersiapkan diri, terutama di tahun 2035. Pasalnya, di masa tersebut, dunia benar-benar tidak pasti karena adanya kemajuan teknologi. Ia juga menurkan adanya politik identitas dan keterbelahan masyarakat, pergeseran ekonomi yang cepat, gaya konflik yang kian berubah serta perubahan iklim dan meningkat populasi orang miskin yang lebih muda. Pendek kata, memerintah menjadi sangat sulit.

"Jadi, kita harus memiliki ide dan narasi yang kuat yang ditopang dengan bacaan yang banyak dan beragam. Kita juga harus mempersiapkan keahlian dan mental, termasuk keahlian dalam berdebat dan menyampaikan gagasan. Harus bersiap dengan konflik yang akan sering terjadi" terang Agus Purnomo.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

15 Ton Beras

dan Berbagai Kebutuhan Pokok untuk warga terdampak Covid-19

Hj. Nevi Zuairina
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar II

"Semua terdampak dan saya tahu bagaimana konstituen mengahadapi krisis akibat Covid-19, saya selalu komunikasi terus, dan tahu konstituen banyak pekerja informal, Insya Allah ibu hadir untuk bantu mereka

Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

Akibat Covid-19,

Nevi Sumbangkan 15 Ton Beras dan Berbagai Kebutuhan Pokok

"Semua terdampak dan saya tahu bagaimana konstituen mengahadapi krisis akibat Covid-19, saya selalu komunikasi terus, dan tahu konstituen banyak pekerja informal, Insya Allah ibu hadir untuk bantu mereka

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar II

Padang (02/05) --- Tidak mau dianggap hadir saat ingin raih suara rakyat saja, Nevi Zuairina terus berbuat dan perhatian terhadap konstituen yang memilihnya di Dapil Sumbar II.

"Semua terdampak dan saya tahu bagaimana konstituen mengahadapi krisis akibat Covid-19, saya selalu komunikasi terus, dan tahu konstituen banyak pekerja informal, Insya Allah ibu hadir untuk bantu mereka,"ujar Nevi Zuairina di Padang, Sabtu (02/05).

Paket Sembako berupa beras dan bahan kebutuhan pokok sudah disiapkan sejak awal April telah mengalir ke konstituen Nevi Zuairina di daerah pemilihan (Dapil) Sumbar II Pemilu 2019 lalu.

Selain beras, gula dan minyak goreng, ada ribuan butir telur di paket Sembako Nevi Zuairina untuk konstituennya di Dapil Sumbar II.

"Ada 15 ton beras dan ribuan telur, gula pasir dan minyak goreng serta mie instan, sudah packing dan telah dikirim ke Dapil Sumbar 2," ujar Nevi.

Legislator FPKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina mengatakan bantuan paket Sembakonya tidak saja untuk Dapil Sumbar II.

"Tidak juga, ada dibagi ke warga di Dapil Sumbar I juga, seperti warga Padang dan Pessel. Kondisi saat ini kan semuanya terdampak,"ujar Nevi

Selain itu Nevi Zuairina yang termasuk rajin turun ke masyarakat pasca Pemilu 2019, saat pandemi ini juga menyediakan buka puasa dengan nasi bungkus, di delapan kota/kab daerah pemilihannya.

"Ada tim sukses yang mengadakannya di setisap kota dan kabupaten Dapil Sumbar II yakini paket nasi bungkus untu buka puasa, Tidak ada buka bersama lagi saat ini kan masih pandemi dan masih PSBB," ujar Nevi Zuairina.

Kunjungan Dapil di Depok

Aleg PKS Bagikan Sembako ke Warga Terdampak Covid

Selain ikhtiar yang sudah dijalani mari kita semua berdo'a semoga Wabah Virus Corona ini segera berlalu sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti semula,

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Depok (27/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi) Nur Azizah Tamhid, mendistribusikan Paket Sembako ke berbagai Komunitas Warga yang terdampak Covid - 19, Sabtu, (25/04/2020).

Dalam kesempatan tersebut Nur Azizah menyampaikan apa yang dilakukannya sebagai wujud kepedulian sebagai wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat.

"Saat ini dengan mewabahnya Covid-19, beberapa masyarakat sedang mengalami beban hidupnya semakin berat," ungkapnya.

Nur Azizah menambahkan, dengan gotong royong dan bahu membahu maka dalam mengatasi pandemik ini maka beban akan berkurang dan akan lebih cepat teratasi.

"Selain ikhtiar yang sudah dijalani mari kita semua berdo'a semoga Wabah Virus Corona ini segera berlalu sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti semula," harap Nur Azizah Tamhid mengakhiri.

Anggota Fraksi PKS Galang Kepedulian Terhadap Rakyat Terdampak covid-19

Ini merupakan rangkaian upaya saya sebagai Wakil Rakyat di Senayan dan teman-teman DPRD PKS di Klaten dan Kota Solo untuk selalu membantu warga yang paling terdampak Covid-19, mereka yang paling merasakan harus kita bantu kelangsungan hidupnya, insya Allah ini akan terus kita lakukan bersama"

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

Solo (27/04) --- Momentum Ramadhan 1441 hijriah tidak dibiarkan berlalu begitu saja tanpa upaya yang terbaik untuk Rakyat agar tetap kuat dan bersabar dengan selalu mendampingi menghadapi dan melewati Pandemi Covid-19.

Salah satu aksi nyata dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari dengan menggalang kepedulian kepada warga di dapilnya lebih khusus lagi membantu para tukang becak, petugas parkir dan kaum marjinal di kabupaten Klaten dan Kota Solo, Jawa Tengah.

" Ini merupakan rangkaian upaya saya sebagai Wakil Rakyat di Senayan dan teman-teman DPRD PKS di Klaten dan Kota Solo untuk selalu membantu warga yang paling terdampak Covid-19, mereka yang paling merasakan harus kita bantu kelangsungan hidupnya, insya Allah ini akan terus kita lakukan bersama" Jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media dari Solo Senin 27 April 2020.

Bersama Kharis ikut membantu Tim Kharis Center membagikan

Ton paket sembako kepada tukang becak dan petugas parkir di sekitar kota Surakarta dan masyarakat marjinal di Kabupaten Klaten dan Insya Allah setiap Jum'at 1 ton beras selama bulan Ramadhan.

Kharis berharap dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di tengah pandemi covid-19 yang belum terlihat akhirnya.

Warjiman, salah satu tukang becak yang mendapatkan bantuan menuturkan kekhawatirannya terhadap kelangsungan kebutuhan keluarganya dengan adanya wabah covid-19 ini yang mana situasi dan kondisi daerahnya yang menuntut untuk lock down sehingga penghasilannya kini hampir tidak ada warga yang menggunakan jasanya.

"Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas sumbangan paket sembako dari Pak Dewan, Pak Kharis semoga Allah balas kebaikannya, Cuma saya mikir anak dan istri sampai kapan harus seperti ini sudah ngga ada sewa, sedih saya Pak " ujar Warjiman menyampaikan curahan hatinya.

Selain memberikan bantuan Sembako, Kharis juga memberikan Alat perlindungan Diri (APD) untuk para tenaga kesehatan yang berjibaku digarda terdepan untuk menyelamatkan korban dan mencegah agar tidak semakin merebak pandemic Covid-19 ini. Sebanyak 300 paket APD baju hazmat dan sarung tangan medis , diberikan ke Puskesmas Serengan, Puskesmas Ngoresan dan Puskesmas Banyuanyar Surakarta pada hari ini, Senin, (27/04/2020).

"APD dan sembako yang kami berikan merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai wujud kepedulian kami di PKS untuk berperan aktif membantu masyarakat terdampak Covid-19 sebagaimana Amanat Presiden PKS dan fraksi PKS, Semua anggota DPR RI PKS diminta untuk terlibat dan berperan aktif dalam berbagai bentuk upaya agar meringankan beban masyarakat," tutup Kharis.

Kunjungi daerah perbatasan, Alifudin apresiasi bupati Sambas

Tadi sebelum masuk perbatasan Kabupaten Sambas kita semua disuruh turun dari mobil dan ikut pemeriksaan di pos pemeriksaan, ini langkah yang sudah bagus. Tapi kondisi kita sedang berlomba dengan virus corona, wilayah Kabupaten Sambas sekarang sudah zona kuning tapi masih kekurangan apd dan rapid test masih sangat sedikit

H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

Sambas (27/04) --- Anggota komisi IX DPR-RI dari Fraksi PKS, Alifudin, melakukan kunjungan dapil pada Ahad (26/04/2020), di Kabupaten Sambas yaitu salah satu kabupaten yang berbatasan dengan negeri jiran, Malaysia.

Kedatangan tersebut langsung disambut oleh ketua dpd pks Sambas, Atbah Romin Suhaili yang menjelaskan dan melaporkan kondisi Kabupaten Sambas selama wabah covid 19.

"Alhamdulillah kami sangat senang dengan kunjungan ini, memang ada beberapa hal yang harus kami sampaikan terkait kondisi dilapangan khususnya kebutuhan selama pencegahan dan penanganan wabah covid 19 di Sambas ini," terang Atbah yang juga merupakan Bupati Kabupaten Sambas.

Dalam kunjungan tersebut juga diketahui bahwa sampai saat ini baru terdapat 20 apd dan 100 alat rapid test covid 19 yang masuk ke dinas kesehatan Kabupaten Sambas dari pemerintah pusat.

"Sangat disayangkan mengingat tingginya jumlah odp pdp di Kabupaten Sambas, ditambah dengan potensi kembalinya ribuan pekerja migran Indonesia dari negri jiran," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Alifudin menerangkan bahwa Komisi IX sudah berulang kali mendorong pemerintah pusat segera merealisasikan bantuan apd dan rapid test covid 19 secara masif, khususnya didaerah perbatasan diharapkan sampai dalam waktu cepat.

"Tadi sebelum masuk perbatasan Kabupaten Sambas kita semua disuruh turun dari mobil dan ikut pemeriksaan di pos pemeriksaan, ini langkah yang sudah bagus. Tapi kondisi kita sedang berlomba dengan virus corona, wilayah Kabupaten Sambas sekarang sudah zona kuning tapi masih kekurangan apd dan alat rapid test masih sangat sedikit, akan kami sampaikan ke kementrian kesehatan terkait hal ini," pungkas Alifudin.

Selama kunjungan dapil tersebut terpantau para peserta tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menjalankan physical distancing

Usul PSBB di Kota Ambon

Saadiah Minta Pemkot Kaji Ulang

"Sebaran covid 19 harus dihentikan. Namun usulan PSBB harus diikuti dengan kepastian dan kesiagaan pemerintah kota dan daerah untuk menyiapan jaring pengaman social"

SAADIAH ULUPUTTY, S.T.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Ambon (01/05) --- Pemerintah kota Ambon sedang menyiapkan usulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

Rencana usulan ini sebagai respon atas penetapan wilayah kota Ambon oleh Kementerian Kesehatan sebagai sebagai satu-satunya kota/kabupaten di Provinsi Maluku yang masuk wilayah sebagai wilayah zona merah (Red Zone) penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku, Saadiah Uluputty menilai, usulan pemberlakuan PSBB di kota Ambon perlu dikaji ulang. Karena butuh kesiapan yang detail.

"PSBB butuh kesiapan pemerintah kota dan pemerintah daerah. Proposal PSBB ke Kemenkes oleh pemerintah kota harus ditinjau ulang", respon Saadiah ketika dimintai tanggapannya di Ambon pada Jumat, (01/05/2020).

Evaluasi pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Regional (PSSR) yang ditetapkan oleh Gubernur Maluku sebelumnya, belum dievaluasi efektifitasnya. Apalagi berkaitan dengan strategi percepatan dan penanggulagan penyebaran covid 19. Terlalu terburu-buru jika siaga covid langsung naik tingkat ke PSBB.

"Dalam pemberlakuan PSSR, percepatan penanggulan penyebaran covid 19 di kota Ambon dan secara umum di Maluku perlu dievaluasi efektifitasnya. Apalagi Ambon menjadi pintu masuk utama. Penataan ini dilakukan lebih dahulu", saran Saadiah.

Dirinya mengingatkan, usulan pembatasan sosial lewat PSBB, akan memberi dampak signifikan terhadap pembatasan lalu lintas dan ruang gerak masyarakat.

Kegiatan ekonomi di Kota Ambon juga akan terdampak sehingga pemkot perlu memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Pemkot juga harus menghitung sarana dan prasarana kesehatan, termasuk ketersediaan wajib menggunakan masker bagi masyarakat.

"Dengan Skenario PSBB ada gerakan pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah dan keluar jika sangat penting. Minimal selama 14 hari. Butuh kesiapan antisipasi pemerintah kota Ambon dan pemprov", telaah Saadiah.

Maka menurutnya, kepastian social safety net (jaring pengaman sosial) dimatangkan penyediaannya oleh pemerintah kota agar kehidupan sosial tetap berjalan dengan lancar.

"Sebaran covid 19 harus dihentikan. Namun usulan PSBB harus diikuti dengan kepastian dan kesiagaan pemerintah kota dan daerah untuk menyiapan jaring pengaman social", tandasnya lanjut.

Dirinya tidak menampik jika sampai sekarang JPS masih menyisakan problem, karena kelambatan pemerintah kota untuk memberi perhatian. Jangkauan sentuhan semacam bansos terhadap warga terdampak covid-19 masih sangat terbatas.

"Membayangkan pemberlakuan PSBB di kota Ambon, tanpa kesiapan JPS, akan memperparah keadaan", lanjut anggota Komisi VII DPR RI ini.

Pelaksanaan PSBB oleh Gubernur Anies Baswedan di Jakarta, sebut Saadiah dapat dijadikan model tentang kesiapan pemerintah daerah ketika mengusulkan PSBB.

"PSBB itu complicated. Kebijakan dan langkah nyata harus siap dari hulu hingga hilir. Tak salah jika Jakarta dapat dijadikan model", imbuh Saadiah.

Dirinya juga mengingatkan agar zona merah covid-19 kota Ambon sudah waktunya diantisipasi dengan penguatan pelayanan di rumah sakit rujukan. "Sarana prasarana kesehatan, APD dan rapid test perlu dicukupkan', kata Saadiah.

Rafli Serahkan APD Medis dan Non Medis Bersama BUMN di Aceh

Selain alat kesehatan, pengadaan masker kain kita arahkan sebaiknya dibeli dari penjahit lokal yang sekarang memproduksinya, jangan masker pun dikirim dari Jakarta, apa yang mampu diproduksi masyarakat di daerah kita tampung

RAFLI
Anggota Komisi VI DPR RI

Banda Aceh (28/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyerahkan secara simbolis bantuan Alat Pelindung Diri (APD) yang bersumber dari CSR Bank Mandiri untuk tenaga medis di Aceh, melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Selasa (28/04).

Hadir bersama anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh itu, Tim Satgas BUMN Bank Mandiri, Pegadaian, PLN, BRI, SBA dan PIM, serta sejumlah tenaga medis.

Jenis Bantuan yang diserahkan berupa APD SET (masker, baju cover all, kacamata google, hair set, sarung tangan 50 buah), APD Disposable 500 buah, masker medis 250 kotak, sepatu medis 50 buah, masker kain nonmedis produksi UMKM binaan BUMN sebanyak 20.000 buah, paket wastafel 10 unit, hand sanitizer 100 buah, pompa desinfektan 20 unit, dan disinfektan 1000 liter.

Dalam kesempatan itu Rafli menyampaikan, selaku mitra kerja BUMN, dirinya wajib melakukan pengawasan terhadap BUMN supaya perusahaan milik rakyat ini lebih dirasakan dampaknya oleh rakyat.

"Peran kita bukan hanya bantuan masker atau APD, kita juga berkonsentrasi menangani persoalan pangan, CSR BUMN itu harus berdayaguna," katanya.

Rafli mengenang saat wabah mulai terprediksi masuk ke Indonesia pada Febuari 2020 silam, saat itu ia usulkan upaya penyelematan manusia dengan membangun ketahanan pangan lokal dan tidak bergantung pada impor dari Cina.

"Pada awal wabah ini terdeteksi, saya sudah mengusulkan bahwa selamatkan manusianya dulu, dengan bangun ketahanan pangan lokal, seandainya itu terjadi mungkin petani kita sudah panen," katanya.

Senada itu, ia juga mengingatkan penyaluaran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN diharapkan menyentuh pemberdayaan masyarakat, produksi pertanian dan perikanan untuk mencapai ketahanan pangan daerah.

"Petani dan nelayan di daerah dalam kondisi seperti ini harus tetap produktif kita berdayakan melalui bantuan CSR BUMN," ujarnya.

Menyoal pemberdayaan industri rumah tangga, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), politisi PKS itu juga mengusulkan agar pengadaan masker kain dibeli dari produksi lokal di daerah, jangan semuanya dikirim dari pusat.

"Selain alat kesehatan, pengadaan masker kain kita arahkan sebaiknya dibeli dari penjahit lokal yang sekarang memproduksinya, jangan masker pun dikirim dari Jakarta, apa yang mampu diproduksi masyarakat di daerah kita tampung," tukasnya.

Unik, Sakinah Aljufri Berbagi Ta'jil Buka Puasa Dengan Cara Ini

Warga yang terpaksa harus keluar rumah karena urusan yang sangat penting dan mendesak, tidak bisa ditunda dan melintas di jalan ini silahkan ambil, namun harus tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran virus corona

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

Palu (30/04) --- Ditengah pandemi Covid-19 saat ini umat muslim wajib tetap menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Kondisi pandemi Covid-19 ini mengharuskan umat muslim menjalani ibadah di rumah, termasuk puasa.

Untuk membantu warga muslim yang menjalankan ibadah di rumah, anggota DPR RI Fraksi PKS Sakinah Aljufri, berinisiatif membagikan ta'jil berkah buka puasa gratis bagi warga muslim yang berpuasa dengan cara menggantungkanya di papan yang telah disediakan di pinggir jalan, Rabu, (29/04/2020) menjelang magrib di Jl. Sis Aljufri Palu.

''Setiap hari selama Ramadhan insyaAllah saya menyediakan ta'jil gratis bagi warga yang melintas di Jl. Sis Aljufri saat menjelang berbuka puasa," ungkap Sakinah.

Pembagian ta'jil gratis ini dikhususkan bagi warga yang terpaksa harus keluar rumah karena urusan yang sangat penting dan tidak bisa ditunda lagi. Demikian halnya Sakinah menghimbau masyarakat yang akan mengambil ta'jil untuk memperhatikan protokol pencegahan covid-19.

"Warga yang terpaksa harus keluar rumah karena urusan yang sangat penting dan mendesak, tidak bisa ditunda dan melintas di jalan ini silahkan ambil, namun harus tetap memperhatikan protokol pencegahan penyebaran virus corona," kata politikus perempuan PKS Sulawesi Tengah ini menjelaskan.

Selain pembagian ta'jil gratis, pada bulan Ramadhan ini juga telah membagikan sumbangan beras bagi warga terdampak Covid-19, masker dan juga jadwal imsakiyah.

"Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadhan, semoga semua amal ibadah kita diterima Allah SWT dan kita menjadi hamba-Nya yang bertaqwa," pungkas Sakinah.

Hamzah, salah satu warga yang melintas turut merasakan ta'jil gratis turut mengapresiasi cara pembagian ta'jil berkah gartis ini.

"Saya apresiasi ide kreatfinya hajah Sakinah dalam membagikan ta'jil berkah gratis bagi warga yang berpuasa dengan menggantungkannya di pinggir jalan. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini pembagian ta'jil dengan cara ini bisa efektif dan menghindari antrian warga," tutur Hamzah

Tak Patah Semangat, Hermanto Utus Tim Serahkan Sembako pada Masyarakat Sumbar

Semoga para penerima sembako khususnya dan kaum muslimin umumnya tetap antusias menjalani ibadah puasa Ramadhan sekalipun dalam kondisi prihatin karena wabah Cofid-19

Dr. HERMANTO, S.E., M.M
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar I

Padang (02/05) --- Larangan moda transportasi darat dan udara trayek Jakarta ke Padang tidak menghalangi Anggota DPR dari Dapil Sumbar 1 Hermanto untuk menyerahkan secara simbolis 4 ton beras dan berbagai jenis sembako lainnya kepada masyarakat Sumatera Barat di Padang, Sabtu (02/05).

Hermanto mewakilkan penyerahan simbolis tersebut kepada timnya yang berada di Sumatera Barat.

"Guna mencegah meluasnya pandemi Covid-19, Pemerintah menerapkan larangan berbagai moda transportasi keluar dari Jabodetabek 24 April - 31 Mei 2020. Kalau harus saya sendiri yang menyerahkan sembako berarti harus tunggu sampai 1 Juni, terlalu lama. Sementara masyarakat sangat butuh bantuan sekarang. Akhirnya diputuskan, sembako dibagikan tanpa kehadiran saya", papar Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

"Pembagian sembako ini terutama ditujukan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat wabah Covid-19", tambahnya.

Wabah covid-19, lanjutnya, masih melanda negeri kita disaat masyarakat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

"Semoga para penerima sembako khususnya dan kaum muslimin umumnya tetap antusias menjalani ibadah puasa Ramadhan sekalipun dalam kondisi prihatin karena wabah Cofid-19", papar legislator dari FPKS ini.

Para wakil masyarakat dari berbagai daerah diundang dalam penyerahan secara simbolis ini. Dari Dapil Sumbar 1, hadir dri Padang dan Pesisir Selatan.

Karena itu dalam kesempatan tersebut penyerahan dilakukan kepada wakil masyarakat dari kedua daerah tersebut. Hadir juga Toni wakil masyarakat Pariaman (Dapil Sumbar 2).

Penyerahan kepada wakil masyarakat Padang dilakukan oleh Pun Ardi, Anggota DPRD Kota Padang Fraksi PKS. Penyerahan kepada wakil masyarakat Pesisir Selatan dilakukan oleh Eko Kurniawan, Sekretaris DPD PKS Pesisir Selatan. Untuk penyerahan kepada masyarakat di daerah-daerah lain di Dapil Sumbar 1 tetap akan dilakukan secara bertahap di hari-hari mendatang.

PROFIL **Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A**

Belajarlah pada potret Keluarga
RASULULLAH SAW

> Untuk keluarga Indonesia, belajarlah dengan sering melihat potret keluarga Rasulullah saw. Penting juga belajar dari keluarga para pejuang kemerdekaan. Semisal Keluarga KH. Agus Salim, Keluarga Moh. Hatta. Keluarga M. Natsir. Dan tokoh teladan lainnya

Pekan ini kita akan bersilaturahmi dengan guru dan teladan dari #Keluarga PKS yaitu Ustadz Surahman Hidayat atau Pak Kiayi.

Dr. K.H. Surahman Hidayat, Lc., M.A. lahir di Ciamis, Jawa Barat, 13 Mei 1957 sebentar lagi akan menginjak usia 63 tahun. *Barrakallah fi umri*k. Anak ketiga dari delapan bersaudara, besar dan menempuh pendidikan hingga menengah atas di Ciamis. Pak Kiyai menempuh pendidikan Agama dari jenjang sarjana hingga doktoral di Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Cairo, Mesir.

Pak Kiyai dibesarkan di lingkungan agama yang cukup kuat karena Abahnya seorang "Ajengan" atau ulama. Selain belajar mengaji, Pak Kiyai aktif di organisasi sejak usia pelajar. Beliau menjadi Ketua Organisasi Siswa Intrasekolah dan Dewan Kerja Pramuka Cabang Ciamis selama dua tahun.

Pak Kyai salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PKS melalui Dapil Jawa Barat X yang meliputi Ciamis, Kuningan, dan Kota Banjar. Saat ini bertugas di Komisi II yang mem-bidangi dalam negeri, pemilihan umum, aparatur pemerintahan dan sejenisnya. Pribadi yang dikenal kaya pengalaman dan luas pengetahuan, serta bijak dalam pandangan. Menjadi salah satu dari sekian alasan pernah meng emban amanah Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menikah dengan Dra. Hj. Cucu Nining Bustomi putri dari KH Bustomi Pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum / BU Awipari Tasikmalaya. Telah dikaruniai putra dan putri yang sholeh/solihah yakni, Is Is Izzatul Mu'minah menikah dengan Muhammad Hasan Hidayatulah, Muhammad Ramdan Hidayat, Nursyahidah Kizlyara dan Praja Miqdam Hidayat. Saat ini cucu sudah dua orang, Lubna Mulka Hidayatulah (4 th) dan Banafsa Arumiya Hidayatulah (4 Bulan)

Pesan Pak Kiyai untuk keluarga Indonesia "Untuk keluarga Indonesia, Belajarlah dengan sering melihat potret keluarga Rasulullah saw. Penting juga belajar dari keluarga para pejuang kemerdekaan. Semisal Keluarga KH. Agus Salim, Keluarga Moh.Hatta . Keluarga M. Natsir. Dan tokoh teladan lainnya"

SOCMED

Untuk mengetahui sepak terjang Dr. K.H. Surahman Hidayat, Lc., M.A dapat mengikuti social media:

Facebook :
Rumah Aspirasi Haji Surahman

You Stay At Home,
We Stay At Parliament
DPR - RI
PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA
PKS

Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI

Website
fraksi.pks.id

Instagram
fraksipksdprri

Twitter
@fraksipksdprri

Facebook
Fraksi PKS DPR RI

Youtube
PKSTV DPR RI

fraksi.pks.id